

**IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DI
KABUPATEN SIMEULUE**

Skripsi

Diajukan Oleh:

CANDRA ALFADI

Nim : 190305040

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya

Nama : Candra Alfadi

Nim : 190305040

Jenjang : Sastra Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang di rujuk sumbernya.

Banda Aceh 9 Desember 2025

Yang Menyatakan,


Candra Alfadi

Nim 190305040

**IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DINAS SYARIAT
ISLAM DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

**Di Ajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Uin Ar-Raniry Salah Satu Beban Studi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Sosisologi Agama**

Di Ajukan Oleh:

CANDRA ALFADI

Mahasiswa Ushuluddin Dan Filsafat

Program Studi : Sosiologi Agama

Nim : 190305040

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr. Inayatillah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197310041998032002

Dosen Pembimbing II,



Musdawati, M.A
NIP. 197509102009012002

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sastra Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Sosiologi Agama

Pada Hari / Tanggal: 9 Desember 2025 M
Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasasyah

Ketua,

Prof. Dr. Inayatillah, S. Ag., M. Ag
NIP. 197310041998032002

Sekretaris,

Musdawati, M. A
NIP. 197509102009012002

Anggota I,

Fatimahsyam, S. E., M. Si
NIP. 197212132023212006

Anggota II,

Evi Yuliana, S. Th. I., M.Sc
NIP. 199107102025212031

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

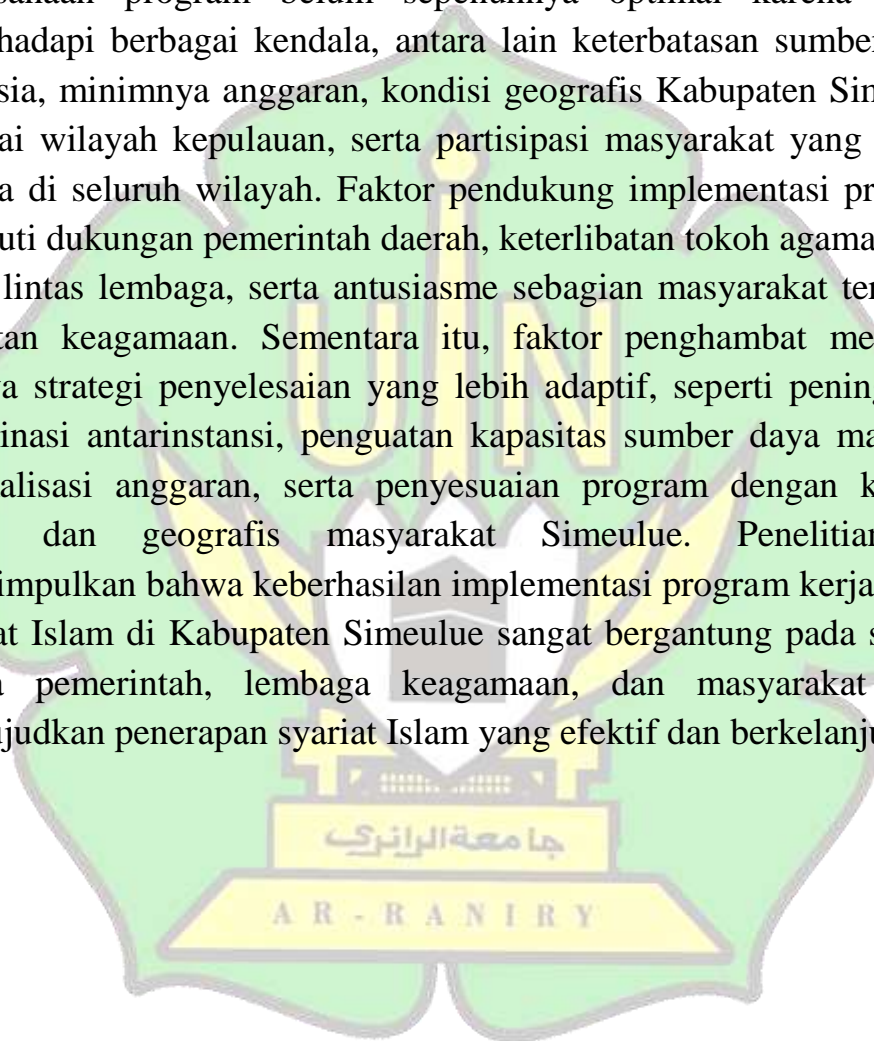
Nama : Candra Alfadi
Nim : 190305040
Judul : Implementasi Program Kerja Dinas Syariat Islam Di
Kabupaten Simeulue
Tebal skripsi: 103 halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Prof. Dr. Inayatillah, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II: Musdawati, M.A

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program kerja Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue dalam rangka penerapan syariat Islam di tingkat daerah. Fokus penelitian diarahkan pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi program kerja Dinas Syariat Islam, termasuk program pembinaan syariat Islam, dakwah keagamaan, pendidikan dayah, penguatan lembaga keagamaan, dan syiar Islam di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kerja tersebut serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Syariat Islam, Sekretaris Dinas, kepala bidang, staf dinas, tokoh agama, pengelola lembaga keagamaan, serta masyarakat yang terlibat dan merasakan dampak dari pelaksanaan program. Data yang terkumpul dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

secara umum telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Program-program yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat, khususnya melalui kegiatan pembinaan keagamaan, dakwah, pendidikan Al-Qur'an, dan penguatan lembaga keagamaan. Namun demikian, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, kondisi geografis Kabupaten Simeulue sebagai wilayah kepulauan, serta partisipasi masyarakat yang belum merata di seluruh wilayah. Faktor pendukung implementasi program meliputi dukungan pemerintah daerah, keterlibatan tokoh agama, kerja sama lintas lembaga, serta antusiasme sebagian masyarakat terhadap kegiatan keagamaan. Sementara itu, faktor penghambat menuntut adanya strategi penyelesaian yang lebih adaptif, seperti peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, serta penyesuaian program dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat Simeulue. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program kerja Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat guna mewujudkan penerapan syariat Islam yang efektif dan berkelanjutan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan, namun berkat bantuan, dukungan, doa, dan motivasi dari banyak pihak, akhirnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

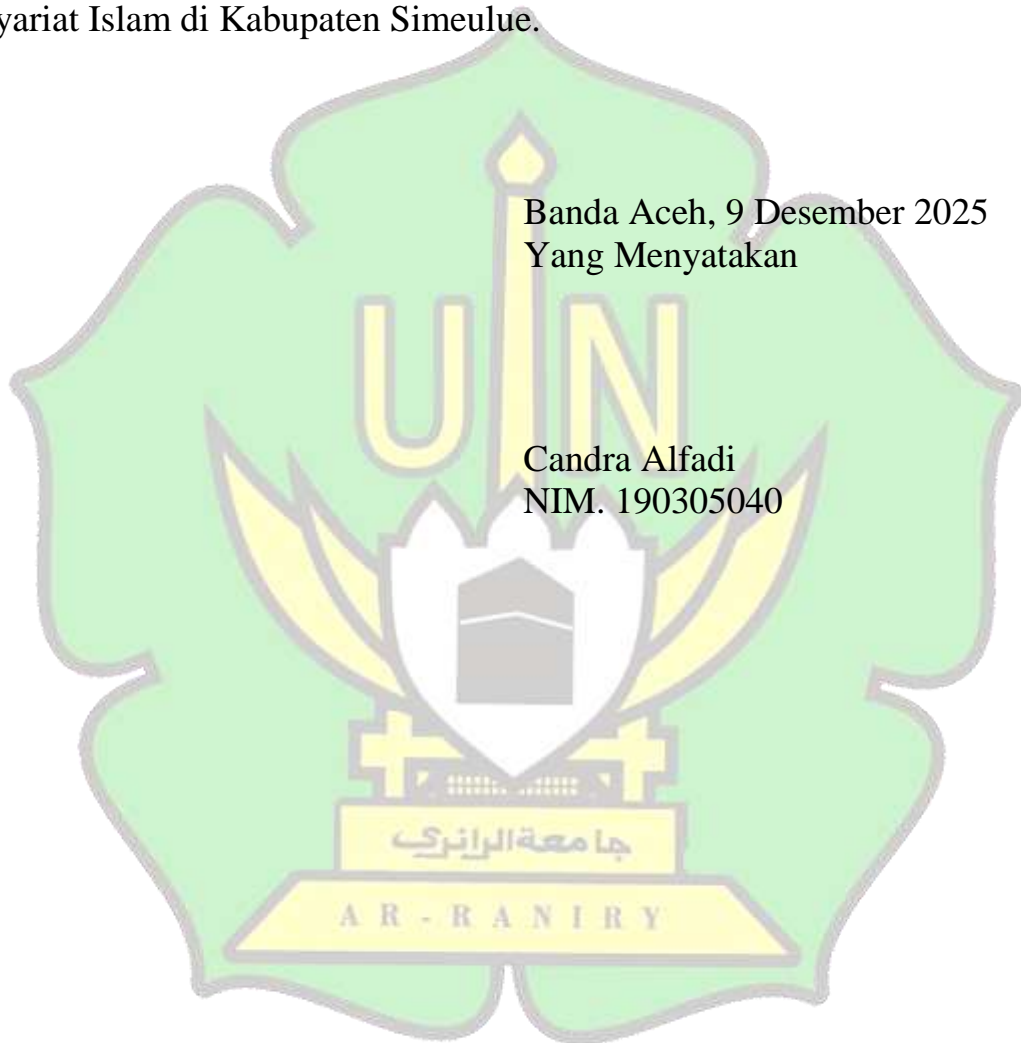
1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan moral, semangat, serta doa yang tiada henti. Segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang mereka menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi, yang telah memberikan izin, arahan, dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Prof. Dr. Inayatillah, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, dan Musdawati M.A., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis mulai dari tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kepala dinas syariat islam kabupaten simeulue, sekretaris dinas syariat islam kabupaten simeulue, semua kabit di masing masing bidang dinas syariat islam kabupaten simeulue, dan seluruh staf dinas syariat islam kabupaten simeulue yang telah memberikan waktu, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di dinas syariat islam tersebut tersebut.
7. Kepada abang, kakak, adik, dan paman, serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan semangat dan doa serta kekuatan untuk menyelesaikan pendidikan.
8. Kepada Deli Hayaty yang telah memberikan dukungan penuh, semangat, dan doa, serta tiada henti selalu mengingatkan untuk sungguh-sungguh mempercepat menyelesaikan pendidikan.
9. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, khususnya teman-teman seangkatan yang selalu memberikan semangat dan kerja sama selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam pengembangan kajian tentang implementasi program kerja dinas syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

Banda Aceh, 9 Desember 2025
Yang Menyatakan

Candra Alfadi
NIM. 190305040



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	14
C. Definisi Oprasional.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Lokasi Penelitian	22
B. Jenis Penelitian	22
C. Informan Penelitian	23
D. Instrumen Penelitian.....	24
E. Sumber Data	25
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue	32
2. Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue	33
3. Visi Dan Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.....	37
4. Renstra Dinas Syarait Islam Kabupaten Simeulue	38
B. Implementasi Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.....	45

1. Perencanaan Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue	46
2. Perorganisasian Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulule.....	51
3. Pelaksanaan Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue	55
4. Evaluasi Dan Pelaporan Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue	60
C. Program-Program yang Dilaksanakan Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue	65
1. Program Pembinaan dan Dakwah Syariat Islam	66
2. Program Pendidikan dan Pembinaan Lembaga Keagamaan	69
3. Program Pembinaan dan Penegakan Syariat Islam di Masyarakat.....	71
4. Tujuan Program Dinas Syariat Islam Terhadap Masyarakat	74
D. faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue	79
1. Faktor Pendukung Implementasi Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.....	80
2. Faktor Penghambat Implementasi Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.....	85
3. Strategi Penyelesaian Penghambat Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.....	90
4. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai penerima manfaat program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.	94
5. Respon dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program dinas syariat islam.....	96
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara yuridis diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Kekhususan tersebut merupakan hasil dari perjalanan sejarah dan perjuangan panjang masyarakat Aceh dalam mempertahankan identitas keislamannya. Penerapan syariat Islam di Aceh bukan sekadar simbol keagamaan, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan publik yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, budaya, dan pembinaan moral masyarakat. Dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah daerah membentuk lembaga khusus yang bertugas menangani urusan syariat Islam, yaitu Dinas Syariat Islam.

Keberadaan Dinas Syariat Islam menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan keagamaan di Aceh. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penguatan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Program-program tersebut mencakup pembinaan pendidikan Al-Qur'an, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan, pembinaan akhlak, serta penguatan institusi keagamaan di tingkat masyarakat. Dalam perspektif sosiologi agama, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan individual,

melainkan juga sebagai kekuatan sosial yang membentuk pola interaksi, nilai, dan struktur sosial masyarakat. Ketika negara terlibat secara langsung dalam pengaturan kehidupan keagamaan melalui kebijakan formal, maka agama mengalami proses pelembagaan dalam struktur kekuasaan. Proses ini melahirkan dinamika baru dalam hubungan antara negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

Kabupaten Simeulue sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh juga menerapkan kebijakan syariat Islam melalui pembentukan Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Secara geografis, Simeulue merupakan wilayah kepulauan yang terpisah dari daratan utama Pulau Sumatera. Kondisi ini menyebabkan akses pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang pembinaan keagamaan, menghadapi tantangan tersendiri. Selain faktor geografis, karakter sosial masyarakat Simeulue yang beragam juga memengaruhi proses penerimaan dan pelaksanaan kebijakan syariat Islam di daerah tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan program Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan geografis wilayah setempat. Implementasi kebijakan tersebut merupakan proses sosial yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan yang saling berinteraksi dalam ruang sosial masyarakat.¹

Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pembinaan kehidupan beragama masyarakat

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan

² Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Profil Dan Program Kerja Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2021.

³ Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

⁴ Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Profil Dan Program Kerja Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2021.

melalui berbagai program kerja yang telah direncanakan setiap tahunnya. Program-program tersebut antara lain penyediaan tenaga pengajar Al-Qur'an, pembinaan remaja masjid, pelatihan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), serta kegiatan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Melalui program ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman keagamaan yang lebih baik serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara lebih konsisten. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan secara teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana di lapangan. Kebijakan yang baik secara konseptual tidak akan memberikan dampak yang berarti apabila tidak diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, pelaksanaan program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue secara umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa program dapat dilaksanakan sesuai rencana, tetapi sebagian lainnya menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi, faktor kesehatan peserta didik, serta keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu.

Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung yang cukup kuat dalam pelaksanaan program, seperti dukungan dari pemerintah daerah, keterlibatan tokoh agama, serta antusiasme sebagian masyarakat

dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial terdapat potensi besar untuk memperkuat pelaksanaan program syariat Islam di Kabupaten Simeulue apabila dikelola secara lebih optimal. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan inilah yang perlu dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian ilmiah.

Dalam kajian sosiologi agama, penerapan kebijakan keagamaan oleh negara dipahami sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Negara melalui perangkat birokrasi berupaya membangun kesadaran kolektif masyarakat agar nilai-nilai tersebut dapat dilembagakan dalam kehidupan sosial. Namun dalam praktiknya, proses tersebut tidak selalu berjalan secara linier dan seringkali diwarnai oleh berbagai dinamika sosial.

Masyarakat Simeulue memiliki latar belakang sosial yang beragam, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, maupun tingkat pemahaman keagamaan. Keragaman ini memengaruhi cara masyarakat dalam merespons program-program yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam. Sebagian masyarakat menerima dengan baik dan berpartisipasi aktif, namun sebagian lainnya masih menunjukkan sikap pasif terhadap kegiatan pembinaan keagamaan. Selain faktor sosial, kondisi geografis Simeulue sebagai wilayah kepulauan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan program. Tidak semua desa dapat dijangkau secara mudah oleh petugas pembina, sehingga intensitas pembinaan antara satu wilayah dengan

wilayah lainnya menjadi tidak merata. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program dalam membangun pemahaman keagamaan masyarakat secara menyeluruh.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam teori implementasi kebijakan, salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia dapat menjadi hambatan yang serius dalam pelaksanaan program.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan area spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada Implementasi program dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue. Adapun subfokus dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Simeulue
2. Apa saja program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambatan pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam di Simeulue ?
2. Apa saja program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue ?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi program kerja Dinas Syariat Islam di Kabupaten simeulue.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan program-program kerja dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
3. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambatan pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam kabupaten simeulue.

E. Manfaat Penelitian

1. Kajian teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pemahaman mengenai Implementasi program dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dalam penerapan program dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain:

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini peneliti dapat memahami lebih jauh bagaimana Implementasi program Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khususnya bagi Dinas Syariat Islam dalam penerapan program dinas syariat islam di Kabupaten Simeulue.
- c. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi peneliti lain yang menyajikan masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penulisan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa referensi yang berkaitan dengan implementasi program serta pandangan masyarakat terhadap implementasi program dinas syariat islam tersebut. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku-buku dan hasil wawancara yang relevan. Kajian pustaka merupakan upaya peneliti untuk menelusuri artikel-artikel, buku-buku, dan penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan agar terhindar dari plagiasi, sehingga penelitian ini dapat dianggap sebagai karya yang asli. Melalui kajian pustaka ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan konsep dan temuan yang ada dalam tulisan-tulisan sebelumnya.

Pertama: Tulisan T. Ridwansyah, Zahratul Idami, Bustami usman 2022, dengan judul “Implementasi kebijakan pemerintah kota banda aceh dalam berbusana islami” Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pada Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh berbusana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi fenomena sosial yang keliru dengan identitas asli dan visi Kota BandaAceh.² penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Implementasi dan Hambatan kebijakan

⁵ T.Ridwansyah1, Zahratul Idami Dan Bustami Usman. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kotabanda Aceh Dalam Berbusana Islami. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Usk*, Volume 07 Nomor 04, Hal. 1-19

berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berbusana Islami oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah yang dikelompokkan melalui: Dasar Kebijakan, lembaga pelaksana, dan Strategi yang digunakan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang berlaku, akan tetapi dalam hal Dukungan sumber daya, pengaruh kepemimpinan, dampak yang terjadi, dan respon masyarakat masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan di lapangan yang menjadi faktor tidak maksimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam berbusana Islami meliputi: (1) Jumlah dan Status personil yang kurang; (2) Razia dan sanksi yang kurang (3) Jadwal patroli yang tidak sesuai.

Kedua: Tulisan Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Salman Abdul Muthalib, Fakhrurrazi denan judul “ Implementasi Syariat Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da’i Perbatasan Di Kabupaten Aceh Tamiang” Kajian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi syari’at Islam di Aceh khususnya mengenai peranan da’i perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan kajian sosilogi hukum yang membahas hukum dalam realitas kehidupan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan dua macam teknik yaitu kajian literatur dan wawancara mendalam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa da'i perbatasan merupakan program dari Dinas Syari'at Islam yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan syari'at Islam di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang ada di Aceh. Yaitu di daerah Singkil, Aceh Selatan, Subulussalam, Simeulue, Aceh Tenggara, dan Aceh Tamiang. Khusus di Aceh Tamiang da'i perbatasan telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.³ Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa da'i perbatasan merupakan program dari Dinas Syari'at Islam yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan syari'at Islam di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang ada di Aceh. Yaitu di daerah Singkil, Aceh Selatan, Subulussalam, Simeulue, Aceh Tenggara, dan Aceh Tamiang. Khusus di Aceh Tamiang da'i perbatasan telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

Ketiga: Tulisan mohd. Reza pahlevi, fakhrur husni, ramazana dengan judul "Implementasi Syariat Islam Dan Strategi Dakwah: Studi Terhadap Peran Pemerintah Dan Lembaga Keagamaan Di Aceh" Dakwah dan Syariat Islam merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada provinsi Aceh, dakwah menjadi fondasi spiritual dan intelektual dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam secara komprehensif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam penguatan dakwah serta peran dari pemerintah Aceh dalam mendukung implementasi

³ Abidin N, M. Zainuddin, Salman Abdul Muthalib Dan Fakhrurrazi. 2021. Implementasi Syari'at Islam Di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Hukum Dan Politik Islam* vol. 6 No. 2: 149-166

⁷ Mohd. Reza P, Fakhrul H. Dan Ramazana. 2025 Implementasi Syariat Islam Dan Strategi Dakwah: Studi Terhadap Peran Pemerintah Dan Lembaga Keagamaan Di Aceh. Volume 3, No. 1, Hal. 27-40

syariat Islam yang holistik dan berbasis kearifal lokal. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah di Aceh merupakan bagian integral dari implementasi syariat Islam yang melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat umum. Adapun pemerintah Aceh sendiri memiliki peran penting dalam pelaksanaan syariat Islam, yang dimulai dari kebijakankebijakan hingga implementasi program syariat itu sendiri. Walaupun banyak program strategis telah dijalankan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga sangat dibutuhkan kerjasama lintas sektor untuk mewujudkan syariat Islam yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat di “Bumi Serambi Mekkah”.

Keempat: Tulisan indrawansyah, farhan indra 2024, dengan judul “Manajemen Pengawasan Dinas Syariat Islam Terhadap Da’i Perbatasan Danau Paris, Aceh Singkil” Pengawasan terhadap Da’i merupakan aspek penting dalam memastikan penyebaran dan penerapan ajaran Islam yang konsisten khususnya di wilayah perbatasan. Peran Da’i khususnya di wilayah perbatasan seringkali menghadapi tantangan geografis dan sosial. Dinas Syariat Islam (DSI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ajaran Islam disampaikan dengan benar dan diterima oleh masyarakat.⁴Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik manajemen pengawasan yang dilakukan oleh DSI terhadap Da’i perbatasan, serta dampak dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yaitu survei,

⁴ Indrawansyah Dan Farhan I. 2024. Manajemen Pengawasan Dinas Syariat Islam Terhadap Da’i Perbatasan Danau Paris, Aceh Singkil. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi (Jrm Dk)* Vol. 6 No. 2, Juli 2024: Hal 146-163

wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSI memiliki peran signifikan dalam mengawasi aktivitas Da'i perbatasan, melibatkan strategi manajemen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh DSI, seperti minimnya sumber daya, koordinasi antar instansi, dan pemahaman ajaran Islam yang tidak konsisten di kalangan Da'i perbatasan.

Kelima: Tulisan Abdul Aziz, Dewi Siti Nurhamidah, Fatimah Azzahra, Fiki Fatur Rohman, Deden, Najmudin 2024, Implementasi Qonun Jinayah di Provinsi Aceh telah membawa perubahan signifikan dalam norma sosial dan budaya masyarakat setempat, sekaligus memperkuat nilai-nilai moralitas yang berdasarkan ajaran agama Islam. Namun penerapan ini juga menghadapi berbagai tantangan termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dalam penegakan hukum, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak Qonun Jinayah terhadap norma sosial dan budaya Aceh serta tantangan yang timbul dari penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Qonun Jinayah mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat Aceh, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Hukum Pidana Islam dan teori implementasi kebijakan, teori ini membantu memahami interaksi antara hukum syariah dan norma sosial dalam konteks masyarakat Aceh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif deskriptif dengan pendekatan campuran. menunjukkan bahwa penerapan Qonun Jinayah telah menghasilkan dampak sosial yang signifikan, termasuk penguatan identitas religius masyarakat Aceh dan penurunan angka kriminalitas tertentu. Secara keseluruhan meskipun Qonun Jinayah memiliki potensi untuk memperkuat moralitas masyarakat berdasarkan ajaran Islam, penerapannya perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam konteks sosial yang lebih luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Qonun Jinayah telah menghasilkan dampak sosial yang signifikan, termasuk penguatan identitas religius masyarakat Aceh dan penurunan angka kriminalitas tertentu. Secara keseluruhan meskipun Qonun Jinayah memiliki potensi untuk memperkuat moralitas masyarakat berdasarkan ajaran Islam, penerapannya perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam konteks sosial yang lebih luas.

Keenam: tulisan Afdhal Musyra, Febi Yuliani, Abdul Sadad 2024, Penelitian ini dilatar belakangi Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah di Aceh yang menerapkan syariat islam. Salah satu qanun syariat yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Hukum Jinayah (hukum pidana) merupakan bagian dari syari'at Islam yang dilaksanakan di Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah periode 2020-2023 di Kota Lhokseumawe serta apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

periode 2020-2023 di Kota Lhokseumawe , Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Lhokseumawe dapat dikatakan belum optimal. Hal ini disebabkan Kurang intensnya kerja sama antara masyarakat dan tokoh agama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe, Kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah serta Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai Qanun Jianayahyang masih rendah.

Berdasarkan dari enam penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian sekarang pada fokus kajian yang sama-sama menelaah implementasi kebijakan atau program Syariat Islam di Aceh dengan pendekatan kualitatif deskriptif, serta penggunaan konsep implementasi kebijakan publik dan peran pemerintah daerah atau Dinas Syariat Islam sebagai aktor utama dalam pelaksanaannya. Seluruh penelitian juga menyoroti adanya tantangan dan hambatan implementasi, baik berupa rendahnya kesadaran masyarakat, faktor sosial-budaya, keterbatasan pengawasan, maupun isu keadilan dan penerimaan publik. Adapun perbedaannya, penelitian-penelitian sebelumnya lebih spesifik pada aspek tertentu seperti berbusana Islami (Banda Aceh), peran dan pengawasan da'i perbatasan (Aceh Tamiang dan Aceh Singkil), strategi dakwah, serta implementasi Qanun Jinayah di wilayah tertentu (Aceh dan Lhokseumawe), sedangkan penelitian

sekarang dengan judul Implementasi Program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue memiliki cakupan yang lebih komprehensif, karena mengkaji berbagai program Dinas Syariat Islam secara menyeluruh di Kabupaten Simeulue, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya dalam konteks sosial masyarakat kepulauan. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi dan memperluas kajian terdahulu dengan menghadirkan konteks wilayah Simeulue yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, sehingga memberikan kontribusi empiris baru dalam studi implementasi Syariat Islam di Aceh.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam menerapkan pola pikir yang sistematis dalam merumuskan teori-teori yang mendukung masalah penelitian. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori sebagai acuan kerangka berpikir yaitu teori Fungsionalisme Struktural.

Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson

Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons Gagasan utama Talcott Parsons dikenal sebagai teori fungsionalisme struktural. Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam bentuk keseimbangan. Pendekatan fungsionalisme struktural ini berasal dari perspektif yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menyatakan bahwa ada saling ketergantungan antara suatu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap

sebagai kondisi yang sama dengan Perusahaan Talcott mengembangkan Parsons selanjutnya pemikirannya sebagai bahwa masyarakat harus dilihat sebagai sistem bagian-bagian yang saling bergantung. Jadi hubungan pengaruh yang mempengaruhi sampai antar bagian adalah timbal balik. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai secara sempurna, sistem sosial pada dasarnya selalu cenderung menuju keseimbangan dinamis. Meskipun ada ketegangan, disfungsi dan penyalahgunaan, sistem sosial masih dalam perjalanan menuju integrasi. Perubahan sistem sosial terjadi secara bertahap melalui adaptasi dan tidak terjadi secara revolusioner.

Dalam buku karya Talcott Parsons yang berjudul “The Social System” memaparkan mengenai fungsi AGIL yang digagas oleh Parsons. AGIL merupakan suatu fungsi atau prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu sistem agar dapat bertahan dan terus bergerak. Fungsi AGIL berkaitan dengan kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya dan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran atau tujuan, serta alat yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.⁵

a. Adaptasi (*Adaptation*)

Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Artinya sebuah sistem yang ada pada masyarakat tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.

b. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

⁵ Anjar Sulistiawati Dan Khoirudin N. 2022. Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda*: Vol 4. No 1. 24-33

¹⁰ Marlian A. Nasution. 2022. Agama Dan Masalah Makna Dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons. *Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*. Vol. 4 No. 1, 129-140

Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Artinya sebuah sistem sosial yang ada dalam masyarakat akan tetap langgeng selama pencapaian tujuan dari sistem sosial tersebut masih dapat terdefiniskan oleh anggota masyarakatnya.

c. Integrasi (*Integration*)

Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Artinya sistem yang ada dimasyarakat tersebut harus mampu mengelola komponen atau fungsi-fungsi penting yang lainnya. Menurut persayaratan utama bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses sosialisasi dan internalisasi yang kemudian menjadi bagian dari kesadaran aktor mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan

d. Pemeliharaan Pola (*Latency*)

maksudnya sistem tersebut akan mungkin tetap survive jika sistem itu mampu memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki dirinya baik berupa motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, di mana setiap unsur memiliki peran untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam pelaksanaan program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, teori ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program bergantung pada kemampuan semua elemen—dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga masyarakat—

untuk berkolaborasi secara efektif. Parsons berpendapat bahwa perubahan sosial berlangsung secara perlahan melalui proses penyesuaian, sehingga Dinas Syariat Islam perlu mengadaptasi programnya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan fungsi AGIL yang meliputi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola, pelaksanaan program syariat Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan sistem sosial.

Adaptasi tampak ketika dinas menyesuaikan kegiatan masyarakat dengan perkembangan zaman. Pencapaian tujuan terlihat dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam. Integrasi diwujudkan melalui koordinasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Sementara pemeliharaan pola tampak dalam upaya mempertahankan nilai, tradisi, dan motivasi keagamaan agar masyarakat tetap konsisten menjalankan syariat Islam. Dengan demikian, implementasi program Dinas Syariat Islam berjalan sebagai bagian dari sistem sosial yang saling menopang.⁶

C. Definisi Oprasional

1. Implementasi program

Pelaksanaan implementasi merupakan suatu proses yang membicarakan penerapan program yang bersifat sosial atau dalam duniapendidikan. Implementasi program yaitu langkah-langkah pelaksanaan suatu kegiatan dalam upaya untuk

⁶ Qurrota A'yun. 2022. Struktural Fungsional Sistem Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi* 11(2):215-228

mencapai tujuan dari program tersebut. Teori implementasi program oleh Charles O. Jones dalam jurnal moral dan kewarganegaraan oleh Fadhila Shofiana menjelaskan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Terdapat tiga dasar dalam mengoperasikan program, yaitu:

- a. pengorganisasian, dibutuhkan struktur organisasi yang jelas sehingga tenaga pelaksana terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
- b. interpretasi, yang dilakukan para pelaksana untuk menerapkan program yang sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c. penerapan atau aplikasi, perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program yang lain.

2. Dinas Syari'at Islam

Dinas Syari'at Islam (DSI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. DSI disertai tugas sebagai koordinator penerapan Syari'at Islam di Aceh. DSI merupakan SKPA yang menjalankan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam visi dan misinya, pelaksanaan Syari'at

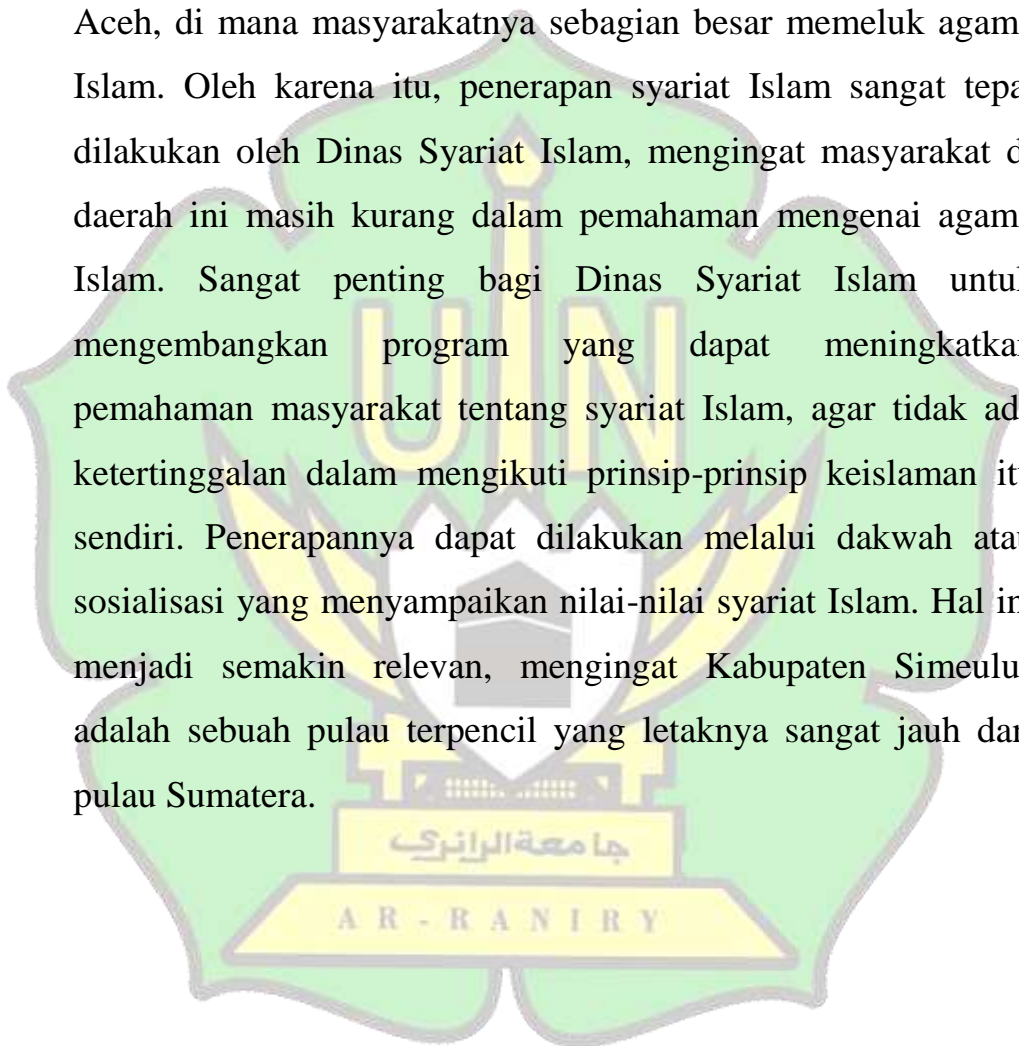
Islam secara kaffah sesuai dengan undang-undang berlaku. Jadi DSI adalah lembaga yang bertanggung jawab dan memastikan berjalannya Syari'at Islam di Aceh. Adapun fungsi Dinas Syari'at Islam adalah: 1) melaksanakan tugas yang terkait dengan merencanakan, menyiapkan qanun kemudian mendokumentasikan dan menyebarluaskannya; 2) menyiapkan dan membina sumber daya manusia; 3) menyiapkan, menata pelaksanaan ibadah dan sarana syiar Islam; 4) membimbing dan mengawasi penerapan syari'at Islam; 5) membimbing penyuluhan syariat Islam. Guna melaksanakan fungsinya, DSI memiliki wewenang yaitu: 1) membuat program, melakukan penelitian dan mengembangkan unsur-unsur Syari'at Islam, 2) melakukan pelestarian nilai-nilai Islam; 3) melakukan pengembangan dan bimbingan semua aspek syariat Islam (sebagaimana disebutkan dalam undang-undang); 4) melakukan pengawasan terhadap penerapan Syari'at Islam; 5) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah DSI kabupaten Simeulue merupakan sebuah organisasi yang menjalankan berbagai program untuk diterapkan kepada masyarakat setempat. Dan DSI kabupaten Simeulue adalah lembaga yang mempunyai tanggung jawab dan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program-program dinas tersebut, seperti memberikan dakwah Islam, pengiriman da'i di daerah perbatasan, serta program lain yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam.

3. Syariat Islam di Aceh

Istilah Syariat Islam adalah frasa yang dibentuk oleh dua kata, yaitu kata Syariat dan kata Islam. Kata Syariat secara etimologis (lughawi) berasal dari Bahasa Arab yaitu “Syariah” yang mempunyai maksud tempat keluar mata air atau sumber mata air. Istilah tersebut berasal dari verba shara‘, yang bermaksud “menuju ke tempat mata air” atau jalan yang mesti diikuti, yaitu jalan ke arah sumber utama bagi kehidupan.¹⁰ Syariat menurut istilah mengandung makna sesuatu yang datangnya dari Allah SWT yang mesti dilakukan oleh manusia supaya kebaikan kehidupan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks Islam, yang dinamakan Syariat adalah merujuk kepada apa yang terdapat di dalam firman Allah SWT melalui al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Syariat sebagaimana dalam pengertian di atas, mengandung segala ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan semua aspek kehidupan manusia yang merupakan implementasi daripada apa yang terangkum dalam agama. Jika dikaitkan dengan kata “Islam”, maka pengertian Syariat menjadi sempit, yaitu Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengimplementasikan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam.

Dapat disimpulkan bahawa Syariat merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia

dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam al-Quran maupun hadis dengan matlamat terciptanya kemashlahatan, kebaikan hidup umat bagian dari Aceh yang memiliki agama. Yang di maksud penelitian ini adalah Kabupaten Simeulue yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, di mana masyarakatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam sangat tepat dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, mengingat masyarakat di daerah ini masih kurang dalam pemahaman mengenai agama Islam. Sangat penting bagi Dinas Syariat Islam untuk mengembangkan program yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang syariat Islam, agar tidak ada ketertinggalan dalam mengikuti prinsip-prinsip keislaman itu sendiri. Penerapannya dapat dilakukan melalui dakwah atau sosialisasi yang menyampaikan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini menjadi semakin relevan, mengingat Kabupaten Simeulue adalah sebuah pulau terpencil yang letaknya sangat jauh dari pulau Sumatera.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian kualitatif lokasi penelitian kali ini berada di Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berada di Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue karena bagi peneliti lokasi tersebut sangat rasional untuk peneliti menemukan sumber data dan permasalahan ini, yaitu Implementasi Program Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue yang belum efektif dalam menjalankan dan penerapan program syariat islam.

B. Jenis Penelitian

Dilihat berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menelusuri bagaimana program-program tersebut merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang akurat dan kontekstual. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat mengamati secara langsung proses kerja aparatur Dinas Syariat Islam, bentuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan, serta interaksi antara dinas dengan masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam implementasi

program, observasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program syariat Islam. Dengan demikian, penelitian lapangan memungkinkan peneliti memahami secara mendalam realitas implementasi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, termasuk keberhasilan, kendala, dan dampak yang ditimbulkan, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi faktual sesuai dengan fokus dan tujuan skripsi.

C. Informan Penelitian

Arikunto dalam Sugiarti dkk. Mengungkapkan bahwa informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Seorang informan adalah orang yang dianggap benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti, sehingga informasi yang disampaikan perlu digali sampai kepada hal yang bersifat detail.

1. Bagong Suyatno menyatakan bahwa informan terdiri atas tiga macam yaitu: Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci yang dituju dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Mereka dipilih sebagai informan kunci karena memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan, penentuan arah program, serta koordinasi seluruh bidang dan unit pelaksana teknis. Selain itu, informan kunci juga mencakup Kepala Bidang atau pejabat struktural terkait yang memahami secara langsung teknis pelaksanaan program syariat Islam,

mulai dari dakwah, pendidikan dayah, pembinaan masyarakat, hingga pengembangan sumber daya syariat Islam. Informasi yang diberikan oleh informan kunci ini menjadi data utama karena bersumber dari pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas implementasi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

2. Informan utama yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. dituju adalah pihak-pihak yang secara langsung melaksanakan dan berinteraksi dalam pelaksanaan program syariat Islam di lapangan. Informan utama tersebut meliputi 8 (delapan) orang pegawai Dinas Syariat Islam pada masing-masing bidang, kepala UPTD Masjid baiturrahman dan Masjid twk Khalilullah Kota Sinabang dan pengelola dayah yang terlibat langsung dalam kegiatan dakwah, pendidikan keagamaan, dan pembinaan masyarakat.
3. Informan tambahan yakni mereka yang bisa memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan tersebut meliputi 2 orang masyarakat umum yang merasakan manfaat atau perubahan sosial dari pelaksanaan program Dinas Syariat Islam.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Instrument yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan data diatas, yaitu: kertas, alat tulis, serta tape recorder

(Handphone untuk merekam) untuk mengumpulkan data melalui wawancara (interview).

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diartikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung melalui sumber yang pertama atau melalui hasil ⁷pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸

2. Data Sukunder

Data sukunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber yang kedua. Dalam hal ini, posisi peneliti bukan orang yang pertama kali mengumpulkan data, tetapi memanfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh pihaklain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data yakni sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diselidiki. Observasi biasanya

⁷ Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Hal.

⁸ Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) H

digunakan untuk meneliti tingkah laku, kegiatan tertentu atau proses perubahan yang tampak. Pengamatan ini difokuskan pada berbagai aspek implementasi program, seperti mekanisme pelaksanaan kegiatan, keterlibatan pegawai dan pihak terkait, serta bentuk interaksi antara Dinas Syariat Islam dengan masyarakat. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung tingkah laku, sikap, dan pola kerja aparatur dinas dalam menjalankan tugasnya, termasuk bagaimana program dakwah, pembinaan masjid, pendidikan dayah, dan kegiatan keagamaan lainnya dilaksanakan. Dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, peneliti dapat memperoleh data yang faktual dan objektif sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai implementasi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan terperinci sebelum penelitian dilaksanakan. Jadi pewawancara hanya akan membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung

mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu perekam atau handphone untuk melancarkan proses wawancara dan menyimpan data dengan akurat. Adapun pihak-pihak yang penliti wawancarai sekaligus informan berjumlah 10 orang, terdiri dari (pegawai atau staf Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue) serta beberapa masyarakat yang berada dikabupaten Simeulue.

3. Metode Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan masih banyak lagi. Berbagai dokumen itu seperti teks (berupa bacaan, rekaman audio, maupun berupa audio visual).

Yusuf dalam Iryana mengungkapkan bahwa dokumentasi berasal dari dokumen, yang memiliki makna tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat datadata yang sudah ada. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tersebut bisa tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang berguna dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Creswel dalam Adhi dan Ahmad analisis data merupakan usaha peneliti untuk memaknai data, baik itu berupa teks ataupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Untuk itu, peneliti harus benar-benar mempersiapkan data tersebut agar dapat dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis data diantaranya adalah:

1. Reduksi Data

Burgin dalam Kusumastuti dan Khoiron, Menyatakan bahwa reduksi data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mengolah data yang dimulai dari editing, koding, hingga tabulasi data. Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan selengkap mungkin dan memilah-milahkan ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Seperangkat hasil kerja reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat secara lebih. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai dengan bidangnya membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian selanjutnya akan dideskripsikan dalam bentuk

kalimat sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laoran setelah mereduksi data, kemudian akan menyusun hasilnya ke dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami dan menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Kesimpulan disajikan ke dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh dilapangan secara akurat dan faktual. Diawali dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Proses selanjutnya sebagai Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Secara umum penelitian dari deduksi itu sendiri merupakan penarikan kesimpulan dari situasi yang umum untuk mendapatkan yang khusus dari yang umum. Maksudnya adalah aktivitas berpikir yang berdasarkan pada hal yang umum (teori, konsep, prinsip dan keyakinan) yang mengarah ke khusus. Dalam hal ini peneliti akan menarik kesimpulan dengan cara menganalisa

suatu objek yang diteliti oleh peneliti yakni Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue setelah itu akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁹



⁹ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Universitas Negeri Malang, 2013.), Hal. 212

⁸ Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), Hal. 71

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang berbeda dibandingkan daerah Aceh daratan. Kabupaten ini terletak di Samudera Hindia dan terdiri dari satu pulau besar, yaitu Pulau Simeulue, serta beberapa pulau kecil lainnya seperti Pulau Teupah, Pulau Simanaha, dan Pulau Siumat. Lokasi yang terpisah dari daratan utama menyebabkan Simeulue memiliki dinamika pemerintahan, pembangunan, serta sosial kemasyarakatan yang khas, termasuk dalam implementasi syariat Islam sebagai bagian dari kebijakan daerah.

Dari sudut pandang geografis, Simeulue memiliki topografi yang terdiri dari pesisir, dataran rendah, dan perbukitan. Keadaan ini menciptakan variasi aktivitas ekonomi masyarakat seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Sebagian besar masyarakat masih tinggal di wilayah pesisir, sehingga akses terhadap pelayanan publik termasuk layanan keagamaan dan pembinaan syariat Islam membutuhkan perencanaan yang matang serta pendekatan yang adaptif. Kondisi alam dan jarak antarwilayah juga menimbulkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah termasuk Dinas Syariat Islam.

Selain aspek geografis, masyarakat Simeulue dikenal sebagai masyarakat religius yang memegang teguh ajaran Islam dalam

kehidupan sehari-hari. Berbagai tradisi lokal seperti “smong” (kearifan lokal terkait mitigasi tsunami) menunjukkan keterkaitan antara nilai budaya, kearifan lokal, dan prinsip keagamaan yang dianut masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam. Namun demikian, perbedaan tingkat pendidikan, akses informasi, serta persebaran penduduk yang tidak merata membuat pembinaan dan pengawasan syariat Islam harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi.

1. Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, membina, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam di wilayah kabupaten. Keberadaan dinas ini menjadi penting mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Simeulue beragama Islam, sehingga penerapan syariat Islam tidak hanya menjadi regulasi formal tetapi juga bagian dari budaya masyarakat.

Secara kelembagaan, Dinas Syariat Islam memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan teknis pelaksanaan syariat, membina masyarakat dalam bidang keagamaan, melakukan penyuluhan, serta menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat. Berbagai program yang dilakukan antara lain pembinaan imam dan khatib, pembinaan keluarga sakinah, penyuluhan qanun syariat, koordinasi dengan Wilayatul Hisbah (WH), serta kerja sama dengan lembaga keagamaan seperti MPU, KUA, dayah, dan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peran Dinas Syariat Islam tidak hanya

administratif, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat sebagai objek pembinaan.

Dinas ini juga berperan sebagai mediator antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan hukuman atau tindakan pembinaan berbasis qanun. Selain itu, dinas ini melakukan monitoring pelaksanaan program-program keagamaan di tingkat kecamatan dan desa. Dalam konteks penelitian ini, profil kelembagaan Dinas Syariat Islam menjadi aspek penting untuk melihat sejauh mana struktur organisasi dan program yang dirancang sesuai dengan karakteristik masyarakat Simeulue.

2. Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Struktur organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, beberapa Kepala Bidang, serta beberapa Seksi yang berada di bawah masing-masing bidang. Struktur ini disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan syariat Islam di tingkat kabupaten serta mengacu pada Peraturan Bupati tentang kedudukan, struktur organisasi, uraian tugas, dan fungsi Dinas Syariat Islam.

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan program syariat Islam. Kepala dinas bertanggung jawab menyusun kebijakan teknis, merumuskan perencanaan strategis, serta memastikan pelaksanaan syariat sesuai dengan ketentuan qanun yang berlaku. Selain itu, kepala dinas wajib melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal

termasuk Mahkamah Syariah, Kepolisian, Wilayatul Hisbah, serta perangkat kecamatan dan desa.

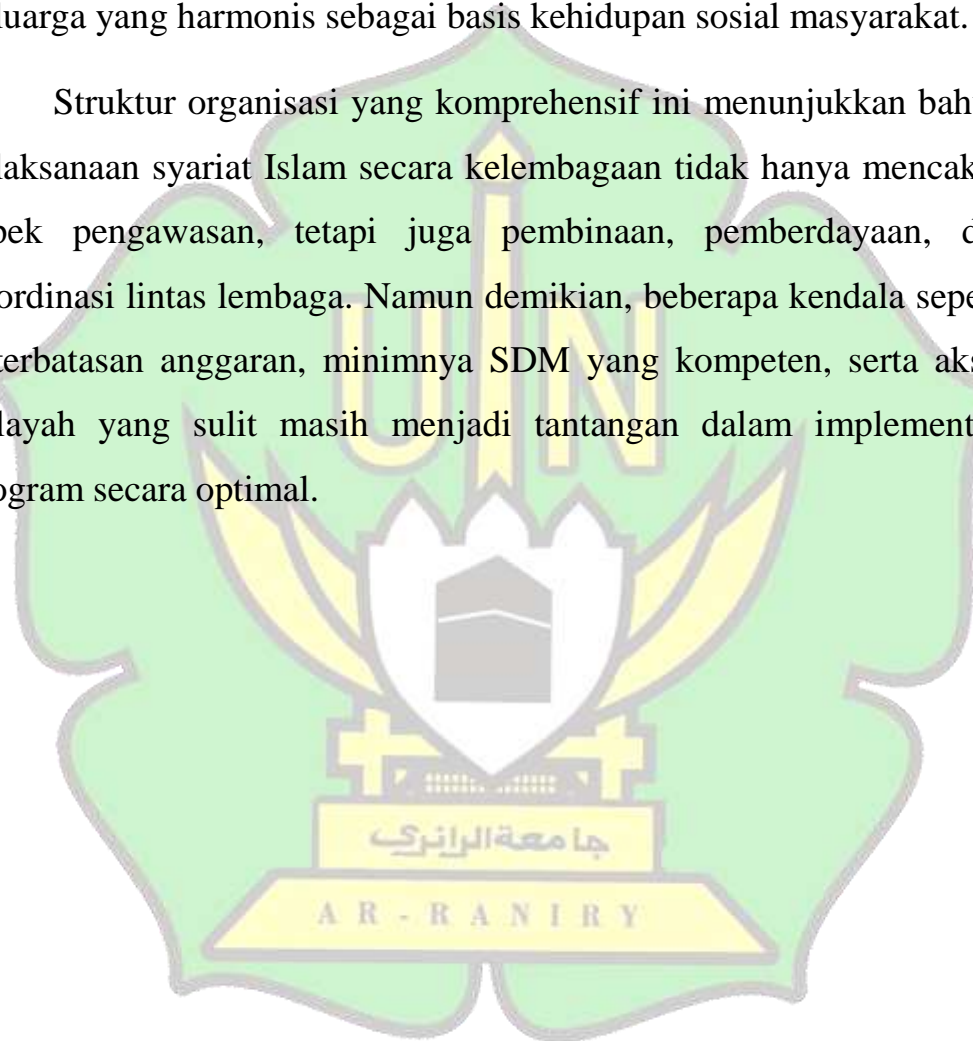
Sekretaris Dinas berfungsi menangani administrasi internal, pengelolaan anggaran, penyusunan laporan tahunan, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai standar pelayanan publik. Sekretaris juga bertanggung jawab terhadap Subbagian Program, Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subbagian Keuangan. Keberadaan sekretariat ini sangat penting karena menjadi pusat administrasi dalam mendukung seluruh program bidang.

Bidang Bina Ibadah memiliki tugas dalam pembinaan umat melalui peningkatan kapasitas imam, khatib, dan penyuluh agama. Bidang ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pelatihan muallaf, penyuluhan akidah, peningkatan pendidikan ibadah, serta fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat. Peran bidang ini sangat strategis karena menyentuh aspek pembinaan langsung kepada masyarakat.¹⁰

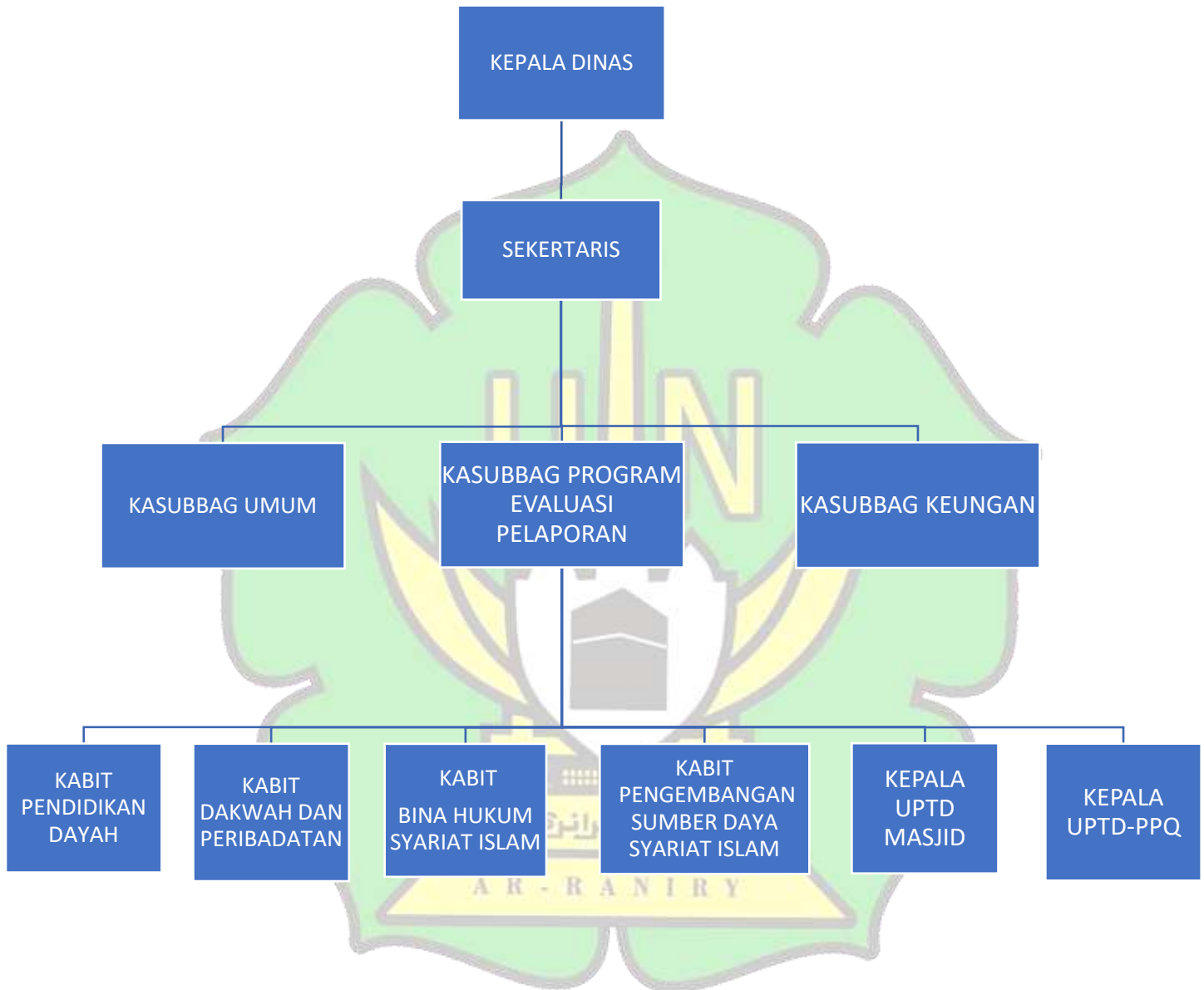
Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Syariat berperan dalam memberikan edukasi mengenai qanun syariat serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Bidang ini bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah dalam menindak pelanggaran syariat seperti khalwat, khamar, dan maisir. Tugas pengawasan mencakup pembinaan, pemberian teguran, penindakan administratif, hingga rekomendasi penegakan hukum sesuai qanun.

Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah memiliki tugas memperkuat ketahanan keluarga melalui program pendidikan pranikah, konseling keluarga, penyuluhan hukum keluarga Islam, serta kegiatan pemberdayaan perempuan dan remaja. Bidang ini bekerja sama dengan KUA dan lembaga pendidikan dalam membangun keluarga yang harmonis sebagai basis kehidupan sosial masyarakat.

Struktur organisasi yang komprehensif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat Islam secara kelembagaan tidak hanya mencakup aspek pengawasan, tetapi juga pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi lintas lembaga. Namun demikian, beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya SDM yang kompeten, serta akses wilayah yang sulit masih menjadi tantangan dalam implementasi program secara optimal.



Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue



3. Visi Dan Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Visi

Mewujudkan Simeulue yang bermartabat dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru tahun 2030

Misi

Penegakan syariat islam dan penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan Masyarakat.

Program strategis “Simeulue Islami berseri”

Kegiatan utama:

- a. Pembentukan pusat dakwah digital:
 1. Membentuk tim IT dan dakwah untuk merancang dan mengoprasikan platfrom digital yang menyebar nilai-nilai islam secara interaktif ke seluruh wilayah Simeulue dengan konten multi media seperti ceramah video, kajian agama Pelajaran islam yang disiarkan langsung.
 2. Menyediakan konsultasi keagamaan online yang terbuka untuk memudahkan Masyarakat dalam bertanya soal agama.
- b. Pendidikan agama modern di sekolah-sekolah:¹¹
 1. Mengembangkan kurikulum syariah agama dengan metode pembelajaran yang lebih modern dan interaktif seperti Penggunaan *e-learning* berbasis aplikasi, modul agama berbasis *augmented reality* serta pelatihan guru agama di Simeulue.

¹¹ Restra Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

2. Mengadakan kompetisi antar sekolah dalam hal hafalan quran, ceramah agama dan debat Islami yang bertujuan meningkatkan minat siswa pada studi agama.

c. Pembangunan Islamic center:

1. Membangun sebuah Islamic center yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan, Pendidikan Islami dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

2. Islamic center ini juga akan memiliki program pelatihan kewirausahaan syariah yang bertujuan memberdayakan umat dalam sektor ekonomi syariah seperti pembentukan koperasi syariah dan pelatihan bisnis halal.

d. Penguatan Lembaga-lembaga Pendidikan berbasis agama (pasantren):

Memberi dukungan dan pendampingan kepada Lembaga-lembaga Pendidikan berbasis agama (pasantren) mengembangkan layanan Pendidikan yang berkualitas dengan menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

4. Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rencana Strategis Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Instruksi Menteri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPK) untuk periode 4 (Empat) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPK. Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rencana Strategis (Renstra) SKPK merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPK yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra SKPK disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPD Kabupaten. Rancangan akhir Renstra SKPK disusun dengan mengacu kepada RPD Kabupaten yang sudah ditetapkan. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.¹²

Pembangunan dan Pengembangan kegiatan keagamaan khususnya pelaksanaan Pendidikan Dayah dan Pelaksanaan Syariat Islam bidang ibadah, Aqidah dan Syiar Islam perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan selalu memperhatikan peningkatan sumberdaya manusia terhadap

¹² Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

pelaksanaan Pendidikan Dayah dan syariat islam dikabupaten Simeulue yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan keagamaan. Pembangunan kegiatan keagamaan khususnya pelaksanaan Pendidikan Dayah dan Syariat Islam bidang ibadah, Aqidah dan Syiar Islam diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah terutama bidang Pendidikan Dayah dan Syariat Islam, hal ini perlu didukung dengan kebijakan pemerintah untuk penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendayagunakan potensi sumberdaya Kependidikan Dayah dan Syariat Islam diperlukan kesungguhan dalam membangun mental dan spiritual bagi masyarakat terutama pendidikan keagamaan disemua sektor, oleh sebab itu Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue perlu merumuskan strategi pembangunan yang tepat. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan kependidikan Dayah dan Syariat Islam yang merupakan bagian dari Perencanaan Strategis, yakni modal dasar (yang antara lain meliputi sumber daya manusia, IPTEK, IMTAQ dan peraturan perundang-undangan), tantangan dan masalah yang dihadapi hingga saat ini, instrumental input dan lingkungan strategis.

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue merumuskan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah / Rencana Strategis (Renstra) SKPK Tahun 2023-2026.

a. Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang- undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonomi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/ tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
20. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

Perencanaan Strategis Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rencana Strategis Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pendidikan Dayah dan Syariat Islam selama 4 (empat) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.¹³

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rencana Strategis Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah:

- a. Menterjemahkan tujuan dan sasaran SKPK dalam mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
- c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SKPK yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
- d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

¹³ Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

- e. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang efektif dan efisien.
- f. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta sebagai rujukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Implementasi Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Implementasi Program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue mengacu pada kajian ilmiah yang menelaah bagaimana program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue dijalankan dalam praktik serta sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokus kajian ini mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program syariat Islam yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan beragama, dakwah, pendidikan keislaman, serta penguatan nilai-nilai syariat di tengah masyarakat.

Dalam konteks sosiologi agama, implementasi program tersebut dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan geografis Simeulue sebagai wilayah kepulauan. Dengan demikian, judul ini menekankan upaya untuk memahami realitas pelaksanaan kebijakan syariat Islam di tingkat lokal, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya, serta

dampaknya terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Kabupaten Simeulue.

1. Perencanaan Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Perencanaan program kerja merupakan tahapan awal dan sangat menentukan dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Perencanaan yang baik menjadi pedoman bagi dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan, pengembangan, dan penguatan syariat Islam di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dilakukan secara sistematis dan berjenjang dengan memperhatikan regulasi, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki.

a. Perencanaan Program Berdasarkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Perencanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue berlandaskan pada regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, qanun-qanun Aceh tentang syariat Islam, serta peraturan daerah dan peraturan bupati yang menjadi pedoman operasional dinas. Dengan adanya landasan hukum tersebut, perencanaan program kerja

disusun agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah serta arah pembangunan Kabupaten Simeulue.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, dijelaskan bahwa setiap perencanaan program diawali dengan menelaah regulasi yang berlaku agar program yang dirancang tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Program-program yang direncanakan juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program kerja tidak disusun secara terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

b. Perencanaan Program Berdasarkan Analisis Kebutuhan Masyarakat

Selain berpedoman pada regulasi, perencanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, laporan dari kecamatan dan gampong, serta masukan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Analisis kebutuhan ini penting agar program yang direncanakan benar-benar relevan dan sesuai dengan kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Simeulue.¹⁵

¹⁴ Wawancara Dengan, MN Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue,

¹⁵ Wawancara Dengan Kepala Bidang Dakwah Dan Peribadatan Menunjukkan Bahwa Perencanaan Program Dakwah, Pembinaan Masjid, Dan Kegiatan Keagamaan Lainnya

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan menunjukkan bahwa perencanaan program dakwah, pembinaan masjid, dan kegiatan keagamaan lainnya disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti rendahnya pemahaman syariat Islam di beberapa wilayah dan masih adanya pelanggaran norma keislaman. Sementara itu, staf Bidang Dakwah menjelaskan bahwa masukan dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan jenis dan lokasi kegiatan. Dengan perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat, program kerja Dinas Syariat Islam diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan meningkatkan kesadaran keagamaan masyarakat secara berkelanjutan.

c. Perencanaan Program Melalui Koordinasi Internal dan Lintas Sektor

Perencanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga dilakukan melalui koordinasi internal antarbidang serta koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait. Koordinasi internal bertujuan untuk menyelaraskan program antarbidang agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, sedangkan koordinasi lintas sektor dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program, Evaluasi, dan Pelaporan, dijelaskan bahwa perencanaan program dilakukan melalui rapat koordinasi

¹⁶ Wawancara Dengan Kepala Bidang Program, Evaluasi, Dan Pelaporan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

internal yang melibatkan seluruh kepala bidang dan staf terkait. Dalam rapat tersebut dibahas rencana kegiatan, target capaian, serta pembagian tugas masing-masing bidang. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan instansi lain seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kementerian Agama, dan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Koordinasi ini penting agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara sinergis dan saling mendukung, sehingga perencanaan program kerja menjadi lebih efektif dan terintegrasi.

d. Perencanaan Program Berdasarkan Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue adalah ketersediaan anggaran dan sumber daya. Setiap program yang direncanakan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Oleh karena itu, perencanaan program dilakukan dengan menetapkan skala prioritas agar program yang paling mendesak dan berdampak luas dapat diutamakan.¹⁷

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Program, Evaluasi, dan Pelaporan yang menjelaskan bahwa tidak semua program dapat direncanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga dinas harus menentukan prioritas program berdasarkan urgensi dan kemampuan anggaran. Selain itu, Plt. Kepala

¹⁷ Wawancara Dengan, Plt. Kepala Uptd Pppq Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

UPTD PPPQ menambahkan bahwa perencanaan program juga mempertimbangkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia agar pelaksanaan kegiatan lebih efisien. Dengan perencanaan yang realistis dan berbasis sumber daya, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue berupaya agar program kerja yang direncanakan dapat diimplementasikan secara optimal meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

e. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Program

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue masih bersifat tidak langsung. Perencanaan program pada umumnya dilakukan secara internal oleh Dinas Syariat Islam dengan mengacu pada Renstra, visi-misi dinas, serta kebijakan pemerintah daerah.

Masukan dari masyarakat biasanya disampaikan melalui forum keagamaan, kegiatan dakwah, atau laporan kebutuhan keagamaan di tingkat desa, seperti kebutuhan guru mengaji, pembinaan remaja masjid, dan penguatan lembaga keagamaan. Dengan demikian, meskipun masyarakat tidak terlibat secara formal dalam penyusunan program, nilai-nilai dan kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat tetap memengaruhi arah perencanaan program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

2. Perorganisasian Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulule

Perorganisasian merupakan tahapan penting dalam implementasi program kerja, karena berfungsi untuk mengatur struktur, pembagian tugas, serta mekanisme kerja agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, perorganisasian dilakukan melalui penataan struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, koordinasi antarbidang, serta pelibatan unit pelaksana dan pihak pendukung lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, perorganisasian program kerja di Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue telah dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku, meskipun masih menghadapi beberapa keterbatasan.

a. Struktur Organisasi sebagai Dasar Perorganisasian Program

Perorganisasian program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue berpedoman pada struktur organisasi yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah dan peraturan bupati. Struktur organisasi tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, beberapa bidang teknis, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah. Struktur ini menjadi dasar dalam pengaturan peran dan

tanggung jawab setiap unsur organisasi dalam melaksanakan program kerja.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, dijelaskan bahwa struktur organisasi menjadi acuan utama dalam mengorganisasikan program kerja agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Setiap bidang bertanggung jawab terhadap program sesuai dengan tupoksinya, seperti bidang dakwah, pendidikan dayah, pengembangan sumber daya syariat Islam, serta bidang program dan pelaporan. Meskipun masih terdapat kekosongan jabatan pada beberapa posisi struktural, struktur organisasi yang ada tetap digunakan sebagai pedoman dalam pembagian tugas. Hal ini menunjukkan bahwa perorganisasian program kerja tetap berjalan dengan mengacu pada sistem organisasi yang telah ditetapkan.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Antar bidang

Pembagian tugas dan tanggung jawab merupakan inti dari perorganisasian program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Setiap bidang diberikan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan program sesuai dengan bidang tugasnya, namun tetap berada dalam koordinasi pimpinan dinas. Pembagian tugas ini bertujuan agar

¹⁸ Wawancara Dengan MN Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue,

pelaksanaan program lebih fokus, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program, Evaluasi, dan Pelaporan, dijelaskan bahwa pembagian tugas dilakukan melalui rapat internal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan dinas. Misalnya, Bidang Dakwah dan Peribadatan bertanggung jawab terhadap program pembinaan keagamaan dan dakwah masyarakat, sementara Bidang Pendidikan Dayah fokus pada pembinaan lembaga pendidikan keagamaan dan MTQ. Selain itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam menyampaikan bahwa meskipun jumlah pegawai terbatas, pembagian tugas tetap diatur secara proporsional agar setiap program dapat terlaksana. Pembagian tugas yang jelas membantu aparatur memahami perannya masing-masing dalam implementasi program kerja dinas.

c. Koordinasi Internal dalam Pelaksanaan Program Kerja

Koordinasi internal merupakan bagian penting dari perorganisasian program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bidang dan unit kerja dapat saling mendukung dalam pelaksanaan program, serta untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Melalui koordinasi yang baik, program kerja dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

¹⁹ Wawancara Dengan Kepala Bidang Program, Evaluasi, Dan Pelaporan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan menunjukkan bahwa koordinasi internal biasanya dilakukan melalui rapat rutin, baik formal maupun informal, yang melibatkan kepala bidang dan staf terkait. Dalam rapat tersebut dibahas progres pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah penyelesaian yang perlu diambil. Selain itu, staf Dinas Syariat Islam menambahkan bahwa komunikasi antarbidang juga dilakukan secara langsung di lapangan, terutama ketika melaksanakan kegiatan bersama seperti safari Ramadan, MTQ, dan pembinaan masyarakat. Koordinasi internal yang intensif menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan perorganisasian program kerja meskipun terdapat keterbatasan sumber daya.

d. **Pelibatan Unit Pelaksana dan Pihak Pendukung dalam Perorganisasian Program**

Selain mengandalkan struktur internal, perorganisasian program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta pihak pendukung lainnya. UPTD memiliki peran strategis dalam melaksanakan program-program tertentu secara teknis di lapangan, seperti pembinaan pendidikan Al-Qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya. Pelibatan pihak pendukung dilakukan untuk

memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala UPTD PPPQ, dijelaskan bahwa UPTD berperan sebagai pelaksana teknis yang bekerja berdasarkan arahan dan kebijakan Dinas Syariat Islam. Selain itu, Sekretaris Dinas menyampaikan bahwa perorganisasian program juga melibatkan tokoh agama, ustaz, dan pengelola masjid sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat. Pelibatan pihak pendukung ini dilakukan karena keterbatasan aparatur dinas, sehingga program kerja tetap dapat berjalan dengan dukungan sumber daya eksternal. Dengan perorganisasian yang melibatkan berbagai unsur tersebut, implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara luas.

3. Pelaksanaan Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Pelaksanaan program kerja merupakan tahapan inti dalam implementasi kebijakan publik, karena pada tahap ini seluruh perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata di lapangan. Dalam konteks Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, pelaksanaan program kerja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penegakan nilai-nilai syariat Islam di tengah

²⁰ Wawancara Dengan Plt. Kepala Uptd Pppq, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan, dakwah, pendidikan keagamaan, serta kerja sama dengan berbagai pihak, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan.

a. Pelaksanaan Program Pembinaan dan Dakwah Keagamaan

Pelaksanaan program pembinaan dan dakwah keagamaan menjadi salah satu fokus utama Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti safari dakwah, pengajian rutin, ceramah keagamaan, pembinaan remaja masjid, serta peringatan hari-hari besar Islam. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ajaran dan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan, dijelaskan bahwa pelaksanaan program dakwah dilakukan secara terjadwal dan menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat umum, pemuda, hingga aparatur gampong. Selain itu, staf Bidang Dakwah menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan dakwah melibatkan tokoh agama dan da'i lokal agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan akses wilayah, program pembinaan dan dakwah tetap dilaksanakan dengan pendekatan

²¹ Wawancara Dengan Kepala Bidang Dakwah Dan Peribadatan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

persuasif dan edukatif sebagai bentuk implementasi syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

b. Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pembinaan Lembaga Keagamaan

Pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga mencakup bidang pendidikan dan pembinaan lembaga keagamaan, seperti dayah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), serta pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Program ini bertujuan untuk mencetak generasi yang memiliki pemahaman agama yang baik serta mampu mengamalkan syariat Islam secara konsisten.²²

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dayah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui pendataan lembaga pendidikan keagamaan, pemberian bantuan operasional, serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Selain itu, Plt. Kepala UPTD PPPQ menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan MTQ dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten sebagai upaya meningkatkan kualitas qari dan qariah. Walaupun masih terdapat keterbatasan fasilitas dan anggaran, pelaksanaan program pendidikan keagamaan tetap berjalan dengan dukungan masyarakat dan lembaga keagamaan setempat.

²² Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendidikan Dayah Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

c. Pelaksanaan Program Penegakan dan Pembinaan Syariat Islam

Selain pembinaan dan pendidikan, pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga berkaitan dengan penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam di masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui sosialisasi qanun syariat Islam, pembinaan hukum Islam, serta koordinasi dengan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam pengawasan pelaksanaan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam, dijelaskan bahwa pelaksanaan program penegakan syariat Islam lebih menitikberatkan pada pendekatan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan. Sosialisasi qanun dilakukan melalui penyuluhan hukum Islam dan kegiatan keagamaan di tingkat gampong. Selain itu, staf Bidang Bina Hukum menambahkan bahwa kerja sama dengan aparat penegak syariat sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Pelaksanaan program penegakan syariat Islam di Kabupaten Simeulue dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi.

d. Pelaksanaan Program Melalui Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue tidak dapat dilepaskan dari kerja sama dan

partisipasi masyarakat. Dinas Syariat Islam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kementerian Agama, aparat gampong, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan program-program keagamaan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan.²³

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program. Tokoh agama dan aparatur gampong berperan sebagai penghubung antara dinas dan masyarakat dalam menyampaikan program dan kebijakan syariat Islam. Selain itu, tokoh masyarakat yang diwawancarai menyampaikan bahwa dukungan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan cukup tinggi, meskipun masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang kurang berpartisipasi. Dengan adanya kerja sama dan partisipasi masyarakat, pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dapat berjalan secara berkelanjutan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

f. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Program

Pada tahap pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat terlihat lebih aktif dan nyata. Masyarakat berperan sebagai peserta, mitra, sekaligus pendukung dalam berbagai kegiatan

²³ Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

yang diselenggarakan Dinas Syariat Islam, seperti pembinaan keagamaan, dakwah, pendidikan Al-Qur'an, pelatihan MTQ, serta pembinaan lembaga keagamaan.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat belum merata di seluruh wilayah, karena perbedaan tingkat kesadaran keagamaan, pendidikan, serta keterjangkauan lokasi, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan

4. Evaluasi Dan Pelaporan Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Evaluasi dan pelaporan merupakan tahapan akhir dalam siklus implementasi program kerja, yang berfungsi untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan pada periode selanjutnya. Dalam implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dan sistematis, meskipun masih menghadapi beberapa keterbatasan. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan pelaporan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa program syariat Islam berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Evaluasi Internal terhadap Pelaksanaan Program Kerja

Evaluasi internal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue untuk menilai pelaksanaan program kerja di setiap bidang. Evaluasi ini

dilakukan secara berkala melalui rapat internal, monitoring kegiatan, serta penilaian capaian program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi internal adalah untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi untuk perbaikan pelaksanaan program.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program, Evaluasi, dan Pelaporan, dijelaskan bahwa evaluasi internal biasanya dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan atau pada akhir tahun anggaran. Evaluasi melibatkan kepala bidang dan staf pelaksana untuk membahas capaian program, tingkat realisasi anggaran, serta kendala teknis di lapangan. Selain itu, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue menambahkan bahwa evaluasi internal juga menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyampaian masukan dan arahan dari pimpinan. Dengan evaluasi internal yang rutin, dinas berupaya menjaga kualitas implementasi program kerja.

b. Evaluasi Program Melalui Monitoring Lapangan dan Umpan Balik Masyarakat

Selain evaluasi internal, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga melakukan evaluasi program melalui monitoring lapangan dan penerimaan umpan balik dari masyarakat. Monitoring lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa program benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan

²⁴ Wawancara Dengan Kepala Bidang Program, Evaluasi, Dan Pelaporan. Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

manfaat bagi masyarakat. Umpan balik dari masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas program, terutama dalam kegiatan pembinaan, dakwah, dan pendidikan keagamaan.²⁵

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan menunjukkan bahwa monitoring lapangan dilakukan secara langsung oleh aparatur dinas maupun melalui laporan dari aparat gampong dan tokoh agama. Selain itu, staf Bidang Dakwah menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat, baik berupa saran maupun kritik, dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan. Evaluasi berbasis umpan balik ini membantu dinas memahami kebutuhan dan respon masyarakat terhadap implementasi program syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

c. Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja kepada Pimpinan dan Pemerintah Daerah

Pelaporan merupakan bagian penting dari implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan pemerintah daerah. Pelaporan dilakukan secara tertulis dan berjenjang, mulai dari laporan kegiatan per bidang hingga laporan tahunan dinas. Laporan tersebut memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, capaian program, penggunaan anggaran, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan.²⁶

²⁵ Wawancara Dengan Kepala Bidang Dakwah Dan Peribadatan Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

²⁶ Wawancara Dengan Kepala Bidang Program, Evaluasi, Dan Pelaporan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program, Evaluasi, dan Pelaporan, dijelaskan bahwa setiap bidang diwajibkan menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bahan penyusunan laporan dinas. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretariat Daerah serta instansi terkait. Selain itu, Sekretaris Dinas menambahkan bahwa laporan pelaksanaan program juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan perencanaan program pada tahun berikutnya. Dengan sistem pelaporan yang terstruktur, dinas dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kerja.

d. Pemanfaatan Hasil Evaluasi dan Pelaporan untuk Perbaikan Program

Hasil evaluasi dan pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Temuan evaluasi digunakan untuk menyesuaikan perencanaan program, meningkatkan metode pelaksanaan, serta mengatasi hambatan yang ditemukan selama implementasi. Pemanfaatan hasil evaluasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam secara berkelanjutan.²⁷

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa hasil evaluasi dan

²⁷ Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

pelaporan menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Selain itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam menyampaikan bahwa evaluasi membantu dinas menentukan program prioritas dan strategi yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan hasil evaluasi dan pelaporan secara optimal, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue berupaya agar implementasi program kerja dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah.

g. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahap Evaluasi Program

Dalam tahap evaluasi, keterlibatan masyarakat masih bersifat informal dan tidak terstruktur. Evaluasi program umumnya dilakukan oleh Dinas Syariat Islam melalui laporan kegiatan, monitoring internal, serta penilaian capaian program. Meskipun demikian, masyarakat tetap berperan sebagai sumber umpan balik (feedback) melalui tanggapan, kritik, dan penilaian terhadap manfaat program yang dirasakan secara langsung.

Masukan masyarakat biasanya diperoleh melalui wawancara, dialog keagamaan, serta pengamatan terhadap tingkat partisipasi dan perubahan perilaku keagamaan masyarakat. Informasi ini menjadi bahan pertimbangan bagi dinas untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian program di masa mendatang. Dengan demikian, walaupun masyarakat belum dilibatkan secara formal dalam mekanisme evaluasi, pengalaman dan respons masyarakat tetap menjadi indikator

penting dalam menilai keberhasilan implementasi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue menunjukkan pola partisipasi bertahap, di mana peran masyarakat paling dominan terlihat pada tahap pelaksanaan. Temuan ini sejalan dengan perspektif fungsionalisme struktural, yang memandang keberhasilan program sebagai hasil kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan sistem sosial keagamaan.

C. Program-Program yang Dilaksanakan Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue

Program-Program yang Dilaksanakan Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue merujuk pada pembahasan mengenai berbagai bentuk kegiatan dan kebijakan yang dirancang serta dijalankan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dalam rangka pembinaan dan penguatan penerapan syariat Islam di tengah masyarakat. Program-program tersebut mencakup bidang pembinaan syariat Islam dan penguatan wawasan keislaman masyarakat, pengembangan pendidikan dayah dan sumber daya manusia keagamaan, penyelenggaraan peribadatan, pembinaan kelembagaan masjid, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), serta kegiatan syiar Islam lainnya. Selain itu, program ini juga meliputi upaya penegakan syariat Islam dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang

berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam konteks skripsi, pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif jenis, bentuk, dan arah program yang dilaksanakan, sekaligus melihat relevansinya dengan kebutuhan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Simeulue sebagai daerah kepulauan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan syariat Islam.

1. Program Pembinaan dan Dakwah Syariat Islam

Salah satu program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue adalah program pembinaan dan dakwah syariat Islam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pembinaan dan dakwah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti safari dakwah, ceramah keagamaan, pengajian rutin, pembinaan remaja masjid, serta peringatan hari besar Islam. Program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dakwah dilaksanakan dengan pendekatan persuasif dan edukatif, serta melibatkan tokoh agama, da'i lokal, dan aparatur gampong. Pendekatan ini dinilai efektif karena tokoh agama memiliki kedekatan sosial dan pengaruh yang kuat di masyarakat. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran dan akses wilayah, program pembinaan dan dakwah tetap menjadi prioritas karena berperan langsung dalam mendukung

implementasi syariat Islam secara berkelanjutan di Kabupaten Simeulue.

a. Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan bagi Masyarakat

Pembinaan keagamaan bagi masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan pembinaan moral, seperti pengajian rutin, ceramah keagamaan, safari dakwah, pembinaan remaja masjid, serta peringatan hari-hari besar Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam serta mendorong masyarakat agar mampu mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah maupun sosial.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, dijelaskan bahwa pembinaan keagamaan dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat gampong. Dalam pelaksanaannya, dinas melibatkan tokoh agama, imam masjid, dan da'i lokal agar materi pembinaan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, staf Bidang Dakwah dan Peribadatan menambahkan bahwa pembinaan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Simeulue. Meskipun masih terdapat keterbatasan anggaran dan akses wilayah, program pembinaan tetap dilaksanakan sebagai upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan syariat Islam.

²⁸ Wawancara Dengan Kepala Bidang Dakwah Dan Peribadatan Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue,

b. Pelaksanaan Dakwah Syariat Islam melalui Pendekatan Persuasif

Selain pembinaan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga melaksanakan program dakwah syariat Islam sebagai sarana penyampaian nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Dakwah dilakukan melalui ceramah, khutbah, dan penyuluhan keagamaan yang disampaikan dalam berbagai forum, seperti masjid, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan lainnya. Pendekatan dakwah yang digunakan lebih menitikberatkan pada metode persuasif dan humanis, dengan menghindari pendekatan yang bersifat memaksa.

²⁹Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa dakwah syariat Islam dilaksanakan dengan mengedepankan keteladanan dan dialog, sehingga masyarakat dapat

agama yang terlibat dalam kegiatan dakwah menyampaikan bahwa kerja sama antara dinas dan para da'i lokal sangat membantu dalam menyampaikan pesan syariat Islam secara efektif. Dakwah yang disampaikan tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga pada pembinaan akhlak dan perilaku sosial masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, program dakwah syariat Islam di Kabupaten Simeulue diharapkan mampu mendorong terciptanya masyarakat yang religius, berakhlak, dan taat terhadap nilai-nilai syariat Islam.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

2. Program Pendidikan dan Pembinaan Lembaga Keagamaan

Program pendidikan dan pembinaan lembaga keagamaan merupakan program penting lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Program ini difokuskan pada pembinaan lembaga pendidikan keagamaan seperti dayah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), serta pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Berdasarkan hasil penelitian, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan, khususnya dalam mencetak generasi muda yang memiliki pemahaman dan pengamalan syariat Islam yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Syariat Islam melakukan pendataan lembaga pendidikan keagamaan, pemberian bantuan operasional, serta pembinaan terhadap tenaga pendidik dan peserta didik. Selain itu, pelaksanaan MTQ dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten sebagai ajang pembinaan dan seleksi qari dan qariah. Program ini mendapat dukungan yang cukup baik dari masyarakat dan lembaga keagamaan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran dalam pelaksanaannya.

a. Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan (Dayah dan TPA)

Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan, khususnya dayah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), menjadi bagian penting dalam program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Pembinaan ini dilakukan melalui pendataan lembaga, pemberian bantuan operasional, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan keagamaan berjalan sesuai dengan standar dan mampu membentuk karakter religius peserta didik.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dayah Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, dijelaskan bahwa dinas secara rutin melakukan pendataan dan pembinaan terhadap dayah dan TPA yang ada di wilayah Kabupaten Simeulue. Selain itu, Plt. Kepala UPTD PPPQ menambahkan bahwa pembinaan juga dilakukan melalui pelatihan bagi guru Al-Qur'an serta pemberian dukungan sarana pembelajaran. Meskipun masih terdapat keterbatasan anggaran dan fasilitas, pembinaan lembaga pendidikan keagamaan tetap dilaksanakan secara bertahap sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan syariat Islam.

b. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagai Sarana Pembinaan

Selain pembinaan lembaga pendidikan keagamaan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga melaksanakan program Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan potensi keagamaan masyarakat. MTQ dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, bahkan menjadi ajang seleksi peserta untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi dan nasional. Program ini

³⁰ Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendidikan Dayah Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an, khususnya di kalangan generasi muda.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dayah menunjukkan bahwa MTQ menjadi salah satu program unggulan karena mampu meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam mempelajari Al-Qur'an. Selain itu, staf Dinas Syariat Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan MTQ juga berfungsi sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual, serta mempererat silaturahmi antarwarga. Meskipun pelaksanaan MTQ masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, program ini tetap dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

3. Program Pembinaan dan Penegakan Syariat Islam di Masyarakat

Program pembinaan dan penegakan syariat Islam di masyarakat merupakan bagian dari upaya Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dalam memastikan pelaksanaan syariat Islam berjalan sesuai dengan ketentuan qanun yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi qanun syariat Islam, penyuluhan hukum Islam, serta koordinasi dengan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam pengawasan pelaksanaan syariat Islam di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penegakan syariat Islam lebih menekankan pada aspek pembinaan dan pencegahan dibandingkan dengan penindakan. Sosialisasi

dilakukan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan dan penyuluhan di tingkat gampong. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat dapat memahami aturan syariat Islam secara menyeluruh dan tidak merasa tertekan dalam penerapannya. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang patuh terhadap ketentuan syariat Islam, program ini tetap dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

Program pembinaan dan penegakan syariat Islam di masyarakat merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan qanun dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program ini lebih menitikberatkan pada pendekatan pembinaan dan edukasi dibandingkan dengan tindakan represif, agar penerapan syariat Islam dapat diterima secara sadar dan berkelanjutan oleh masyarakat.

a. Pembinaan Masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi Syariat Islam

Pembinaan masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi syariat Islam yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat kecamatan maupun gampong. Bentuk kegiatan pembinaan meliputi penyuluhan hukum syariat Islam, ceramah keagamaan, pengajian, serta penyampaian materi tentang

qanun syariat Islam dalam berbagai forum keagamaan. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai kewajiban dan larangan dalam pelaksanaan syariat Islam.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, dijelaskan bahwa pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama dan aparatur gampong sebagai mitra kerja. Pendekatan ini dinilai efektif karena tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Selain itu, staf Bidang Bina Hukum Syariat Islam menambahkan bahwa pembinaan lebih difokuskan pada pencegahan pelanggaran syariat Islam melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami qanun syariat Islam, kegiatan pembinaan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kepatuhan secara bertahap.

b. Penegakan Syariat Islam melalui Koordinasi dan Pendekatan Persuasif

Selain pembinaan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga melaksanakan program penegakan syariat Islam di masyarakat. Penegakan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegak syariat Islam di daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian,

³¹ Wawancara Dengan Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue,

penegakan syariat Islam di Kabupaten Simeulue lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, dengan mengutamakan pembinaan sebelum dilakukan tindakan penertiban.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa penegakan syariat Islam dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Penindakan dilakukan sebagai langkah terakhir apabila upaya pembinaan tidak membuahkan hasil. Selain itu, Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan menyampaikan bahwa kerja sama lintas instansi sangat penting dalam penegakan syariat Islam, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan masyarakat. Dengan pendekatan persuasif dan koordinatif ini, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam.

4. Tujuan Program Dinas Syariat Islam Terhadap Masyarakat

Pelaksanaan program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat, baik dalam aspek pengetahuan, perilaku, maupun tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan syariat. Dampak ini muncul dari berbagai program seperti safari dakwah, pembinaan lapas, pembinaan dayah, pelatihan qari/qariah, penyuluhan hukum jinayah, kegiatan MTQ, hingga pembangunan sarana ibadah. Berikut uraian dampak secara komprehensif:

a. Tujuan terhadap Peningkatan Pengetahuan Syariat Islam Masyarakat di Kabupaten Simeulue³²

Salah satu dampak paling terlihat adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai syariat Islam. Informan M. Thahir menjelaskan bahwa program dakwah dan penyuluhan rutin membantu masyarakat memahami batasan-batasan syariat, terutama terkait akhlak, ibadah, dan hukum jinayah. Program sosialisasi yang dilakukan pada kecamatan dan desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan yang benar dari sisi syariat.

Selain itu, kegiatan pembinaan di lapas juga memberikan dampak positif bagi narapidana. Mereka memperoleh pemahaman baru tentang tanggung jawab moral dan hukum Islam, sehingga meningkatkan kesadaran keagamaan. Dari sisi pendidikan, pembinaan dayah turut meningkatkan kemampuan masyarakat memahami ilmu-ilmu dasar syariat, seperti fiqh, tauhid, dan akhlak. Dengan demikian, program-program yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam telah meningkatkan taraf literasi keagamaan masyarakat, yang menjadi fondasi bagi pembentukan perilaku Islami.³³

b. Tujuan terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat di Kabupaten Simeulue

³² Wawancara Dengan M Staf Bidang Bina Hukum. Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

³³ Wawancara Dengan M Staf Bidang Bina Hukum. ¹⁸wawancara Dengan M Thahir.

Peningkatan pengetahuan tersebut berhubungan langsung dengan perubahan perilaku masyarakat. Menurut informasi dari WS, program pembinaan dan dakwah secara signifikan mengurangi pelanggaran syariat, seperti maksiat, khalwat, dan perilaku menyimpang lainnya. Meskipun belum sepenuhnya hilang, tetapi kecenderungan masyarakat untuk menghindari pelanggaran semakin meningkat.

Program safari subuh, pembinaan remaja masjid, dan kegiatan keagamaan lainnya berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ibadah berjamaah, terutama kalangan pemuda.⁵ Sementara itu, pembinaan qari dan qariah mendorong minat masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, untuk mempelajari Al-Qur'an dengan lebih serius. Hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPPQ juga menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti pelatihan intensif mengalami peningkatan kedisiplinan dan akhlak, sehingga berpengaruh pada lingkungan keluarga.⁶

c. Tujuan terhadap Kepatuhan terhadap Syariat Islam di Kabupaten Simeulue

Dinas Syariat Islam bekerja sama dengan WH dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan pembinaan masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya rasa patuh dan kehati-hatian masyarakat terhadap aturan syariat, terutama dalam hal ibadah, pergaulan, dan etika berpakaian.⁷ Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang kurang patuh, sebagaimana disebutkan oleh Marzuki, namun secara umum tingkat kesadaran terus membaik

setiap tahun.⁸ Program edukatif dianggap lebih efektif dibanding tindakan represif sehingga masyarakat tidak merasa ditekan tetapi didorong secara persuasif. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat semakin memahami bahwa penerapan syariat Islam bukan hanya tugas pemerintah melainkan tanggung jawab seluruh umat Islam.³⁴

d. Tujuan terhadap Penguatan Lembaga Keagamaan di Kabupaten Simeulue

Program pelatihan qari/qariah, pembinaan imam dan khatib, serta penguatan dayah turut memperkuat eksistensi lembaga keagamaan di Simeulue. Hal ini berdampak pada:

1. Meningkatnya kualitas imam, khatib, dan guru ngaji;
2. Bertambahnya peserta dan santri di dayah dan TPA;
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan MTQ di tingkat kabupaten;
4. Meningkatnya sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan.

Menurut Dasrianti, kegiatan UPTD seperti PPPQ menghasilkan generasi muda yang lebih siap menghadapi ajang MTQ—baik tingkat regional maupun nasional sehingga menciptakan efek sosial positif bagi masyarakat.¹⁰

e. Tujuan Sosial dan Moral di Tengah Masyarakat

Program syariat Islam juga bertujuan pada kehidupan sosial masyarakat, di antaranya:

¹⁹wawancara Dengan M, Kabid Pengembangan Sdm Syariat Islam.

²⁰ Wawancara Dengan WS Kabid Program Evaluasi Dan Laporan.

1. Meningkatnya kepedulian antarwarga dalam kegiatan keagamaan;
2. Penguatan nilai-nilai gotong royong berbasis ajaran Islam;
3. Meningkatnya harmoni sosial akibat menurunnya potensi konflik moral
4. Meningkatnya rasa aman karena perilaku menyimpang dapat ditekan.

Menurut Sri Rahayu, program dakwah di Desa Busung Indah berhasil menumbuhkan suasana sosial yang lebih religius, termasuk meningkatnya kegiatan pengajian dan majelis taklim.¹²

f. Tujuan terhadap Pembinaan Generasi Muda di Kabupaten Simeulue

Dinas Syariat Islam memberikan perhatian besar kepada generasi muda melalui program pelatihan Al-Qur'an, kegiatan remaja masjid, dan pembinaan akhlak. Program ini berdampak pada:

1. Meningkatnya kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an;
2. Terbentuknya karakter islami sejak dini;
3. Menjauhkan remaja dari pergaulan bebas dan kenakalan;³⁵
4. Meningkatnya prestasi generasi muda dalam bidang keagamaan.¹³

Program ini sangat penting mengingat generasi muda merupakan fondasi penerapan syariat Islam di masa depan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas, Kepala

Bidang, dan Staf Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, program-program yang telah dan sedang dilaksanakan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

D. faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue didukung oleh beberapa faktor strategis yang berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan syariat Islam di daerah. Faktor pendukung utama adalah adanya landasan regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta qanun-qanun syariat Islam, yang memberikan legitimasi hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi Dinas Syariat Islam dalam merancang dan melaksanakan program kerja. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dan pimpinan instansi, kerja sama lintas sektor dengan Majelis Permusyawaratan Ulama, Kementerian Agama, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat turut memperkuat implementasi program.³⁶ Budaya masyarakat Simeulue yang religius dan memiliki ikatan kuat dengan nilai-nilai Islam juga menjadi modal sosial yang mendukung pelaksanaan program, sehingga kegiatan pembinaan, dakwah, pendidikan dayah, pengelolaan masjid, serta syiar Islam relatif mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat.

³⁶ Wawancara Dengan, Sekertaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Namun demikian, implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program secara merata di seluruh wilayah. Masih terdapat kekosongan jabatan struktural, keterbatasan aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang syariat Islam, serta beban kerja pegawai yang tinggi. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Simeulue sebagai wilayah kepulauan dengan akses yang terbatas, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap syariat Islam, serta adanya sikap resistensi dari kelompok tertentu juga menjadi tantangan dalam implementasi program. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

1. Faktor Pendukung Implementasi Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Keberhasilan implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendukung yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Faktor pendukung tersebut menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan penerapan syariat Islam di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, faktor pendukung

implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue meliputi dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, kerja sama lintas sektor, serta dukungan masyarakat dan budaya lokal yang religius.

a. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue adalah adanya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang kuat. Pelaksanaan program-program syariat Islam memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, serta berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam. Keberadaan regulasi tersebut memberikan legitimasi hukum dan kepastian kewenangan bagi Dinas Syariat Islam dalam menjalankan program kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, dijelaskan bahwa seluruh program yang dilaksanakan oleh dinas telah disusun dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program tidak bersifat sementara atau insidental, melainkan direncanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan dari pimpinan daerah, seperti Bupati dan Sekretaris Daerah, juga memperkuat posisi Dinas Syariat Islam dalam

melaksanakan tugas pembinaan dan penguatan syariat Islam di Kabupaten Simeulue. Sekretaris Dinas Syariat Islam menambahkan bahwa dengan adanya payung hukum yang jelas, dinas memiliki dasar yang kuat untuk berkoordinasi dengan instansi lain serta menjalankan program lintas sektor. Regulasi dan kebijakan pemerintah daerah ini menjadi fondasi utama yang memungkinkan program kerja Dinas Syariat Islam dapat dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan.

b. Ketersediaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Faktor pendukung berikutnya dalam implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue adalah ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, baik dari internal dinas maupun dari luar instansi. Meskipun secara kuantitas masih terdapat keterbatasan jumlah aparatur, Dinas Syariat Islam tetap mampu menjalankan program melalui optimalisasi peran pegawai, tenaga honorer, serta dukungan tenaga keagamaan di masyarakat.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Pendidikan Dayah, diketahui bahwa pelaksanaan program banyak melibatkan ustaz, da'i, guru TPA, tenaga pendidik dayah, serta dewan hakim dan juri MTQ. Keterlibatan tenaga keagamaan ini menjadi kekuatan tersendiri karena mereka memiliki kompetensi keilmuan serta kedekatan sosial dengan masyarakat. Dengan demikian, pesan-pesan syariat Islam dapat disampaikan secara lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat di tingkat

³⁷ Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue,

kecamatan dan desa. Selain itu, hasil wawancara dengan staf Dinas Syariat Islam menunjukkan bahwa semangat kerja dan komitmen aparatur dinas juga menjadi faktor pendukung penting. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya, para pegawai tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab melalui koordinasi antarbidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada secara maksimal menjadi modal penting dalam mendukung implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.³⁸

c. Kerja Sama dan Koordinasi Lintas Sektor

Implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue juga sangat didukung oleh adanya kerja sama dan koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi terkait. Dinas Syariat Islam tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin kolaborasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kementerian Agama, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Baitul Mal, instansi pendidikan, serta aparat keamanan.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan, kerja sama lintas instansi ini terlihat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti penegakan qanun syariat Islam, pembinaan masyarakat, peringatan hari besar Islam, safari Ramadan, serta pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dari tingkat kabupaten hingga nasional. Melalui koordinasi yang baik, setiap

³⁸ Wawancara Dengan Staf Dinas Syariat Islam Menunjukkan Bahwa Semangat Kerja Dan Komitmen Aparatur Dinas Juga Menjadi Faktor Pendukung Penting

³⁹ Wawancara Dengan Kepala Bidang Dakwah Dan Peribadatan,

instansi dapat menjalankan perannya masing-masing sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, Sekretaris Dinas Syariat Islam menyampaikan bahwa komunikasi yang intensif antarinstansi membantu mengatasi berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan kondisi geografis. Dengan adanya sinergi lintas sektor, implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan, sehingga tujuan penerapan syariat Islam dapat tercapai secara optimal.

d. Dukungan Masyarakat dan Budaya Lokal yang Religius

Faktor pendukung lainnya yang tidak kalah penting adalah dukungan masyarakat serta budaya lokal yang religius. Kabupaten Simeulue merupakan daerah yang masyarakatnya memiliki ikatan kuat dengan nilai-nilai Islam. Kondisi ini menjadi modal sosial yang besar bagi Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan program-program kerjanya.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Syariat Islam dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, dakwah di masjid, pembinaan remaja masjid, pendidikan dayah, serta kegiatan MTQ. Masyarakat tidak hanya menjadi sasaran program, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan syariat Islam di lingkungan masing-masing. Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam menjelaskan bahwa dukungan tokoh agama dan

⁴⁰ Wawancara Dengan Staf Dinas Syariat Islam Dan Tokoh Masyarakat,

tokoh masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam. Selain itu, keberadaan masjid, dayah, dan lembaga keagamaan yang tersebar hingga ke tingkat desa memudahkan pelaksanaan program pembinaan dan dakwah. Dengan adanya dukungan masyarakat dan budaya religius yang kuat, implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dapat berjalan lebih efektif dan diterima secara luas oleh masyarakat.

2. Faktor Penghambat Implementasi Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Faktor penghambat implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue sebagaimana temuan dalam penelitian ini berasal dari aspek internal dan eksternal organisasi. Hambatan internal terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, di mana masih terdapat kekurangan jumlah aparatur, kompetensi teknis yang belum merata, serta keterbatasan dana yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program di seluruh wilayah. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Simeulue sebagai wilayah kepulauan dengan akses transportasi dan infrastruktur yang terbatas turut menyulitkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara merata. Dari sisi eksternal, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam, serta adanya sikap kurang partisipatif dari kelompok tertentu, menjadi tantangan dalam implementasi program kerja. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue tidak hanya ditentukan oleh

perencanaan dan pelaksanaan internal dinas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya, kondisi wilayah, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi aparatur. Berdasarkan struktur organisasi yang ada, masih terdapat kekosongan jabatan struktural, khususnya pada eselon IV, yang berdampak pada beban kerja pegawai yang harus merangkap tugas di beberapa bidang sekaligus. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat berjalan secara maksimal dan optimal, terutama dalam kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan masyarakat di lapangan.⁴¹

Hal tersebut diungkapkan oleh MN (Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue) yang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pejabat struktural dan tenaga profesional di lingkungan dinas. Walaupun demikian, pihak dinas tetap berupaya menjalankan program dengan mengedepankan koordinasi antarbidang dan UPTD agar kegiatan tetap terlaksana. Senada dengan itu, M (Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam) juga menegaskan bahwa keterbatasan pegawai negeri sipil dan tenaga profesional menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program, khususnya program yang membutuhkan tenaga ahli di bidang syariat Islam. Keterbatasan

⁴¹ MN. (Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue)
Wawancara Dengan M (Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam)

SDM ini secara langsung memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dan keberlanjutan program kerja dinas.

b. Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Keuangan Daerah

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Meskipun sebagian besar program telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Renstra, realisasi pelaksanaan di lapangan sering kali terkendala oleh keterbatasan dana, pemangkasan anggaran, serta kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Akibatnya, tidak semua program dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, baik dari segi cakupan wilayah maupun frekuensi kegiatan.

Hal ini disampaikan oleh WS (Kepala Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan) yang menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Dasrianti (Plt. Kepala UPTD PPPQ) yang menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan MTQ, pelatihan, dan pembinaan peserta. Selain itu, M (Staf Bidang Bina Hukum) menegaskan bahwa kekurangan dana juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan keagamaan yang telah dijadwalkan, sehingga memerlukan penyesuaian skala dan prioritas program. Dengan

demikian, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat optimalisasi implementasi program kerja dinas.⁴²

c. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Sebagian Masyarakat

Hambatan lain dalam implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam. Meskipun Kabupaten Simeulue dikenal sebagai daerah yang religius, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran syariat Islam, seperti perjudian, minuman keras, khalwat, serta kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan berbusana Islami. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya membuahkan hasil yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan R (Kepala Bidang UPTD Masjid), rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan serius karena masih ada kelompok tertentu yang merasa terganggu dengan penerapan aturan syariat Islam.⁴³ Pernyataan serupa juga disampaikan oleh SRN (Staf Bidang Dakwah) yang mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami qanun dan regulasi syariat Islam, sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, DMT menambahkan bahwa kurangnya perhatian dan pemahaman masyarakat menyebabkan program pembinaan dan penyuluhan hukum syariat Islam tidak selalu direspons secara positif. Kondisi ini menjadi

⁴² Wawancara Dengan, WS. (Kepala Bidang Program, Evaluasi Dan Pelaporan) M (Staf Bidang Bina Hukum)

⁴³ Wawancara Dengan R. (Kepala Bidang Uptd Masjid), Wawancara SRN (Staf Bidang Dakwah) Dinas Syariat Islam Kaabupaten Simeulue

penghambat dalam menciptakan kepatuhan kolektif terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

d. Kondisi Geografis dan Akses Wilayah yang Terbatas

Faktor penghambat terakhir adalah kondisi geografis Kabupaten Simeulue yang merupakan wilayah kepulauan dengan akses transportasi dan infrastruktur yang masih terbatas. Jarak tempuh yang jauh ke pelosok desa, kondisi jalan yang kurang memadai, serta keterbatasan sarana transportasi menjadi kendala dalam pelaksanaan program, terutama program pembangunan sarana ibadah, pembinaan masyarakat, dan kegiatan dakwah di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan distribusi program tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Hambatan ini diungkapkan oleh SRN (Staf Bidang Dakwah) yang menyatakan bahwa jarak tempuh ke desa-desa terpencil menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika anggaran terbatas. Senada dengan itu, M juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program sering kali harus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan anggaran yang tersedia. Keterbatasan akses ini menuntut adanya strategi khusus dan kerja sama dengan masyarakat serta instansi terkait agar program kerja Dinas Syariat Islam tetap dapat dilaksanakan meskipun dengan berbagai keterbatasan.

3. Strategi Penyelesaian Penghambat Program Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Dalam pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, berbagai faktor penghambat tidak dapat dihindari, baik yang bersumber dari internal organisasi maupun dari kondisi eksternal masyarakat dan wilayah. Oleh karena itu, Dinas Syariat Islam tidak hanya mengidentifikasi hambatan yang ada, tetapi juga merumuskan berbagai strategi penyelesaian agar implementasi program tetap berjalan dan tujuan penerapan syariat Islam dapat tercapai secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, strategi penyelesaian hambatan tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyesuaian strategi pelaksanaan program dengan kondisi geografis daerah.⁴⁴

a. Strategi Penguatan dan Optimalisasi Sumber Daya Manusia

Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia adalah dengan melakukan optimalisasi peran aparatur yang ada serta memanfaatkan dukungan tenaga keagamaan dari luar instansi. Meskipun masih terdapat kekosongan jabatan struktural dan keterbatasan jumlah pegawai, dinas berupaya menjaga agar pelaksanaan program tetap berjalan melalui pembagian tugas yang fleksibel dan koordinasi antarbidang.

⁴⁴ Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, dijelaskan bahwa strategi yang ditempuh antara lain adalah memaksimalkan peran staf dan tenaga honorer, serta melibatkan ustaz, da'i, guru TPA, dan tenaga dayah dalam pelaksanaan program pembinaan masyarakat.⁴⁵ Selain itu, dinas juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui pembelajaran internal dan berbagi pengalaman antarpegawai. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam menambahkan bahwa meskipun keterbatasan SDM menjadi kendala, semangat kerja dan komitmen aparatur menjadi modal penting dalam menjalankan program. Dengan strategi ini, kekurangan jumlah pegawai dapat diimbangi melalui kerja sama dan dedikasi aparatur yang ada.

b. Strategi Optimalisasi Anggaran dan Penentuan Skala Prioritas Program

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue menerapkan strategi optimalisasi penggunaan anggaran serta penentuan skala prioritas program. Tidak semua program dapat dilaksanakan secara bersamaan dan maksimal, sehingga dinas melakukan seleksi program berdasarkan tingkat urgensi dan dampak langsung terhadap masyarakat. Program-program yang bersifat pembinaan dasar dan menyentuh kebutuhan masyarakat luas menjadi prioritas utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program, Evaluasi, dan Pelaporan, dijelaskan bahwa dinas berupaya

⁴⁵ Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue,

menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan keuangan daerah tanpa menghilangkan substansi tujuan syariat Islam. Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan skala yang lebih kecil atau digabungkan dengan program instansi lain untuk menghemat anggaran. Selain itu, Plt. Kepala UPTD PPPQ menyampaikan bahwa optimalisasi anggaran juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia, serta melibatkan masyarakat dan lembaga keagamaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Strategi ini memungkinkan program tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan dana yang ada.

c. Strategi Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap syariat Islam menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi program. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue menerapkan strategi pendekatan persuasif dan edukatif melalui peningkatan intensitas sosialisasi, dakwah, dan pembinaan keagamaan. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan, dijelaskan bahwa strategi yang diterapkan adalah memperbanyak kegiatan dakwah di masjid, safari Ramadan, pengajian rutin, serta pembinaan remaja masjid dan generasi muda. Tokoh agama dilibatkan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan pesan-pesan syariat Islam karena memiliki pengaruh dan kedekatan dengan masyarakat. Selain itu, staf Bidang Dakwah menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada pembinaan dan

penyadaran, bukan semata-mata penegakan aturan. Dengan strategi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami syariat Islam secara lebih utuh dan menerima implementasi program dengan kesadaran, bukan karena paksaan.

d. Strategi Penyesuaian Program dengan Kondisi Geografis dan Wilayah

Kondisi geografis Kabupaten Simeulue sebagai wilayah kepulauan dengan akses yang terbatas menuntut adanya strategi khusus dalam pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam. Untuk mengatasi hambatan ini, dinas melakukan penyesuaian pola pelaksanaan program dengan mempertimbangkan jarak, akses transportasi, dan kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah. Program-program pembinaan dan dakwah dilaksanakan secara terjadwal dan terkoordinasi agar dapat menjangkau wilayah terpencil secara bertahap.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bidang Dakwah dan Kepala UPTD Masjid, dijelaskan bahwa dinas sering bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan gampong untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di desa-desa terpencil. Selain itu, dinas juga memanfaatkan momentum kegiatan keagamaan besar, seperti peringatan hari besar Islam dan MTQ, untuk menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah sekaligus. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam menambahkan bahwa penyesuaian strategi ini dilakukan agar keterbatasan akses tidak menjadi

⁴⁶ Wawancara Dengan Staf Bidang Dakwah Dan Kepala Uptd Masjid,

penghalang utama dalam pelaksanaan program. Dengan strategi yang adaptif terhadap kondisi geografis, implementasi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue tetap dapat berjalan secara berkesinambungan.

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai penerima manfaat program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

secara umum masyarakat menilai bahwa program-program yang dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menyebutkan bahwa kegiatan seperti dakwah keagamaan, pembinaan pengajian, pendidikan Al-Qur'an, serta pembinaan masjid dan dayah membantu mereka dalam memahami ajaran Islam secara lebih baik dan terarah. Program tersebut dirasakan sangat membantu, terutama bagi masyarakat di desa-desa yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pembinaan keagamaan secara rutin.

Lebih lanjut, masyarakat juga menyampaikan bahwa keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program bersifat aktif sebagai peserta kegiatan, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam proses perencanaan. Masyarakat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Syariat Islam dengan antusias, terutama ketika program tersebut dilaksanakan melalui masjid, meunasah, dan lembaga keagamaan setempat. Kehadiran tokoh agama, imam masjid, dan guru mengaji yang dilibatkan oleh dinas dinilai mampu meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat

untuk berpartisipasi, karena program disampaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal Simeulue.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat merasakan manfaat program secara merata. Beberapa informan menyebutkan bahwa keterbatasan jarak, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta frekuensi kegiatan yang belum rutin menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan pembinaan keagamaan secara optimal. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang masih bersikap pasif karena kesibukan ekonomi dan kurangnya pemahaman awal mengenai pentingnya mengikuti program pembinaan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan manfaat program sangat dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri.

Dalam pandangan masyarakat, program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue tetap dianggap penting dan perlu dilanjutkan dengan perbaikan ke depan. Masyarakat berharap agar kegiatan keagamaan dapat lebih sering dilaksanakan, menjangkau seluruh wilayah, serta melibatkan masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam memberikan masukan dan evaluasi. Harapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek penerima program, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang mendukung keberlanjutan implementasi syariat Islam. Dengan adanya respons positif dan harapan dari masyarakat, dapat disimpulkan bahwa penerimaan manfaat program Dinas Syariat

Islam cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek pemerataan dan keberlanjutan pelaksanaan.

5. Respon dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program dinas syariat islam

Berdasarkan hasil penelitian, respon masyarakat terhadap implementasi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue secara umum menunjukkan sikap positif dan menerima dengan baik. Masyarakat menilai bahwa program-program yang dilaksanakan, seperti pembinaan keagamaan, dakwah Islam, pendidikan Al-Qur'an, serta penguatan lembaga keagamaan, sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat Simeulue. Kehadiran program tersebut dipandang sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membina kehidupan beragama dan meningkatkan pemahaman syariat Islam. Respon positif ini terlihat dari kesediaan masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan serta dukungan moral yang diberikan kepada aparatur dan tokoh agama yang terlibat.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue tampak cukup aktif, khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan. Masyarakat terlibat sebagai peserta pengajian, jamaah masjid, remaja masjid, guru mengaji, serta pengurus lembaga keagamaan yang menjadi mitra dinas di tingkat lokal. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam

mendukung kelancaran program di lapangan. Pelaksanaan kegiatan yang berbasis masjid, meunasah, dan dayah dinilai memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi karena dekat dengan lingkungan sosial mereka.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat respon dan partisipasi masyarakat belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue. Perbedaan kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan, keterbatasan akses transportasi, serta kesibukan ekonomi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi di beberapa daerah. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman keagamaan turut memengaruhi cara masyarakat merespons program yang dilaksanakan. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif, bukan karena menolak program, melainkan karena keterbatasan waktu dan kurangnya intensitas sosialisasi.

Secara keseluruhan, respon dan partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue. Program yang mendapat dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat cenderung berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat perlu terus diupayakan melalui pendekatan yang lebih persuasif, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penyesuaian program dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat Simeulue.

Sinergi antara Dinas Syariat Islam dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan implementasi syariat Islam yang berkelanjutan dan bermakna.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue secara umum telah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Implementasi program mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Program-program tersebut mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, khususnya akibat kondisi geografis Simeulue sebagai daerah kepulauan serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
2. Program-program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue meliputi program pembinaan dan dakwah syariat Islam, pendidikan dan pembinaan lembaga keagamaan, pembinaan penegakan syariat Islam di masyarakat, serta penguatan syiar Islam. Program-program tersebut diarahkan untuk membina kehidupan keagamaan masyarakat melalui kegiatan dakwah, pendidikan Al-Qur'an, pembinaan dayah, pembinaan masjid, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan. Secara substantif, program-program ini relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan tujuan penerapan syariat Islam di daerah, meskipun

pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dari segi intensitas dan pemerataan.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue sangat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan pemerintah daerah, keterlibatan tokoh agama dan lembaga keagamaan, serta antusiasme sebagian masyarakat terhadap kegiatan keagamaan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, kondisi geografis wilayah kepulauan yang sulit dijangkau, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Syariat Islam melakukan berbagai strategi, seperti meningkatkan koordinasi lintas lembaga, memperkuat kapasitas aparatur dan tenaga pembina, serta menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat Simeulue.

B. Saran

1. Kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, disarankan agar meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dengan memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, dai, dan tenaga pembina keagamaan, serta mengupayakan penambahan dan optimalisasi anggaran agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah secara lebih merata, khususnya daerah terpencil dan kepulauan.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, disarankan untuk terus memberikan dukungan kebijakan dan kelembagaan secara konsisten, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan koordinasi lintas sektor dengan tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pemerintah gampong, sehingga implementasi program syariat Islam dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Kepada Masyarakat dan Tokoh Agama, disarankan agar meningkatkan partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dalam mengikuti serta mendukung program-program Dinas Syariat Islam, sehingga nilai-nilai syariat Islam tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dapat diinternalisasikan dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan sosial sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Abdul, Dewi Siti Nurhamidah, Fatimah Azzahra, Fiki Fatur Rohman, Deden, & Najmudin. (2024). Implementasi Qanun Jinayah di Provinsi Aceh: Dampak terhadap norma sosial dan budaya masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Islam*, 8(1), 45–60.
- Musyra Afdhal, Febi Yuliani, & Abdul Sadad. (2024). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Kota Lhokseumawe periode 2020–2023. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Islam*, 6(2), 112–130.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutinah & Bagong, S. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indrawansyah T, & Farhan Indra. (2024). Manajemen pengawasan Dinas Syariat Islam terhadap Da'i perbatasan Danau Paris Aceh Singkil. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 23–39.
- Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nurdin, A., Zainuddin, M., Abdul Muthalib, S., & Fakhurrazi. (2019). Implementasi syariat Islam di Aceh: Studi kasus

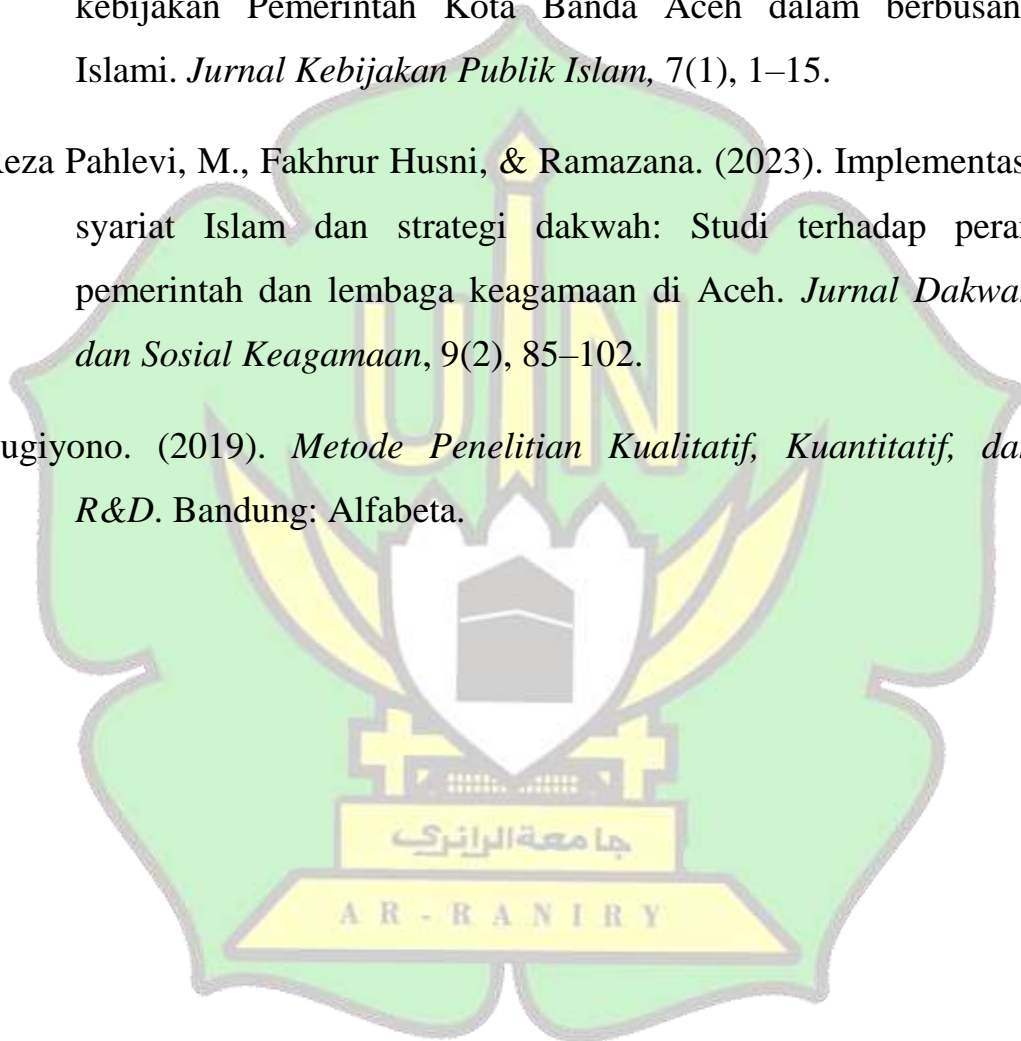
peranan Da'i perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, 4(2), 101–118.

Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: The Free Press.

Ridwansyah, T., Idami, Z., & Usman, B. (2022). Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam berbusana Islami. *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, 7(1), 1–15.

Reza Pahlevi, M., Fakhur Husni, & Ramazana. (2023). Implementasi syariat Islam dan strategi dakwah: Studi terhadap peran pemerintah dan lembaga keagamaan di Aceh. *Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 9(2), 85–102.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Candra Alfadi / 190305040
Tempat/ Tanggal Lahir : Langi / 05 agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Langi, Kec. Alafan, Kab. Simeulue, Prov Aceh, Indonesia
Orang Tua
Nama Ayah : Malib Amin
Nama Ibu : Hafni
Alamat : Desa Langi, Kec. Alafan, Kab. Simeulue, Prov Aceh, Indonesia
Pendidikan
SD/MIN : SD Negeri 4 Alafan
SMP/MTS : SMP Negeri 1 Alafan
SMA/MA : SMA Negeri 2 Banda Aceh
PT : UIN Ar- Raniry Banda Aceh
Prodi : Sosiologi Agama

Demikian riwayat hidup inisaya buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Banada Aceh, 18 November 2025
Penulis,

Candra Alfadi

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja program-program yang telah di terapkan dinas syariat islam kabupaten Simeulue?
2. Dimana program-program dinas syariat islam dilaksanakan?
3. Kapan dilaksanakan program-program ?
4. Mengapa program tersebut dilaksanakan?
5. Bagaimana proses program saat di laksanakan?
6. Apa saja tugas dan fungsi dinas syariat islam di kabupaten simeulue?
7. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh dinas syariat islam kabupaten Simeulue dalam rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap syariat islam?
8. Apa saja sumber daya yang digunakan oleh dinas syariat islam di Simeulue dalam melaksanakan program-programnya?
9. Apa saja hasil yang di harapkan dari program-program dinas syariat islam di kabupaten Simeulue?
10. Apa saja peran dan tanggung jawab dinas syariat islam di kabupaten Simeulue?
11. Apa saja hubungan dinas syariat islam di kabupaten Simeulue dengan instansi lain dalam melaksanakan program-programnya?
12. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh dinas syariat islam kabupaten Simeulue dalam melaksanakan program-programnya?
13. Apa saja strategi yang digunakan oleh dinas syariat islam kabupaten Simeulue untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas program-programnya?

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

Wawancara Dengan Sekdis Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue



Gambar Wawancara Dengan Kepala Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue



Gambar Wawancara Dengan Staf Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue



Gambar Wawancara Dengan Kepala Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue



Gambar Wawancara Dengan Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue



Gambar Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendidikan Dayah Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue



Gambar Wawancara Dengan Staf Bidang Dakwah Dan Pribadatan Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue



Gambar Wawancara Dengan Kepala Bidang UPTD Masjid Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue



Gambar Wawancara PLTD Bidang UPTD PPQ

